



**PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI KECURANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Sri Puspita Sari

160810301127

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI KECURANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelas Sarjana Ekonomi

Oleh:

Sri Puspita Sari

160810301127

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Ya Allah alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Mu, saya dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan, kekuatan, dan kelancaran bagi saya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya;
2. Kedua orang tua saya Ibu Purwaningsih dan Bapak Supriyono yang selama ini selalu memberi semangat, memberi kekuatan bagi saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dan tentunya selalu senang tiasa mendoakan saya dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk ketiga kakak saya Eko Wahyono, Dwi Surya, Try Nur Fauzi yang selalu memberikan doa dan kekuatan untuk saya agar dapat menjalaninya dengan semangat;
3. Ibu Kartika dan Bapak Whedy Prasetyo selaku dosen pembimbing saya atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu dosen Akuntansi yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan yang banyak;
4. Serta Almamater yang selalu kuagungkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Semua akan indah pada waktunya, nikmati apa yang sedang terjadi”

(Sri Puspita Sari)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Puspita Sari

NIM : 160810301127

Menyatakan dengan sejujurnya bahwa hasil skripsi ini yang berjudul "Pengaruh *Fraud Diamond* Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo) adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keaslian dan kebenaran atas penelitian saya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebaik mungkin, tanpa ada tekanan dari pihak mana pun dan saya bersedia menerima sanksi dari akademik jika ternyata pertanyaan ini tidak benar.

Jember, 10 April 2020

Yang menyatakan,



Sri Puspita Sari

NIM 160810301127

SKRIPSI

**PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI KECURANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)**

Oleh :

Sri Puspita Sari

NIM 160810301127

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Kartika, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing II : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN SIDOARJO)

Nama Mahasiswa : Sri Puspita Sari
NIM : 160810301127
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal : 15 April 2020
Persetujuan

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,



Kartika, S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 19820207 200812 2002

Pembimbing II,



Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 19770523 200801 1012

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistyio, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI KECURANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Puspita Sari

NIM : 160810301127

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

4 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak (.....)
NIP. 19720416 200112 1 001

Sekretaris : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak (.....)
NIP. 19710217 200003 1 001

Anggota : Oktaviani Ari W., S.E., M.Sc (.....)
NRP. 760016882

digitally signed by
Oktaviani Ari
Wardhaningrum
22/05/2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP 197107271995121001

ABSTRAK

PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI KECURANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA
KECAMATAN SIDOARJO)

Sri Puspita Sari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana gambaran kecurangan-kecurangan dapat terjadi pada sektor pemerintah khususnya pada sektor pemerintah desa di kecamatan sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang terdiri dari metode regresi linier berganda, uji f, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap kecurangan. Sedangkan untuk kompetensi memiliki hasil positif signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah desa di kecamatan sidoarjo.

Kata Kunci: kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern, budaya organisasi, kompetensi, dan kecurangan pada pemerintah desa.

ABSTRACT

***THE IMPACT OF DIAMOND FRAUD ON FRAUD VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT (STUDI CASE IN THE VILLAGE GOVERMENT SIDOARJO
SUB-DISTRICT)***

Sri Puspita Sari

*Department of Accounting Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

This study aims to show and explain how the picture of fraud can occur in the government sector, especially in the village government sector in Sidoarjo sub-district. This study uses data collection techniques in the form of primary data by distributing questionnaires. The research analysis method used is descriptive statistics, data quality test, classic assumption test and hypothesis testing consisting of multiple linear regression methods, f test, t test, and coefficient of determination. The results of this study indicate that there is a significant negative effect between the suitability of compensation, internal control systems and organizational culture for fraud. As for the competency, it has a significant positive result of fraud on the village government in Sidoarjo sub-district.

RINGKASAN

Pengaruh *Fraud Diamond* Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo); Sri Puspita Sari; 160810301127; 71 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kecurangan merupakan perilaku penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara merugikan orang lain. Di Indonesia tindakan kecurangan banyak terjadi dikalangan instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi. Korupsi merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan oleh para pelaku kecurangan.

Pada tahun 2018 *Indonesia Corruption Watch* mencatat kasus korupsi yang terjadi mencapai 1.087 kasus. Terdapat sekitar 139 kepala daerah maupun kepala desa yang melakukan tindakan kasus korupsi. Tindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun kepala desa paling sering terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan 68 tindakan korupsi yang menghabiskan Rp. 90,2 M.

Pada sektor pemerintah di Sidoarjo juga terlibat beberapa tindakan kecurangan: 1) pembangunan TPST yang menghabiskan sebesar Rp. 590 Juta yang dilakukan oleh salah seorang PNS; 2) korupsi apbdes sebesar Rp. 227 Juta yang menyeret kepala desa Wonokupang; 3) kepala desa Pemasahan yang menggelapkan uang dana desa sebesar Rp. 52 Juta; 4) kepala desa Glagah Arum melakukan korupsi apbdes sebanyak Rp. 225 Juta; 5) bendahara desa Pilang melakukan apbdes yang menghabiskan Rp. 600 Juta.

Faktor-faktor yang mendorong adanya tindakan kecurangan karena minimnya kompensasi yang diterima oleh pegawai pemerintah desa rendah bahkan tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakaan, tidak adanya transparansi dalam melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan dana desa maupun yang tidak berhubungan dengan dana desa secara langsung, serta didukung oleh

pengawasan, buruknya budaya organisasi yang diterapkan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pemerintah desa yang lemah atau tidak memadai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang menunjukkan bahwa *fraud diamond* berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kecurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan kecurangan yang menggunakan *fraud diamond* sebagai dasar pengambilan, yakni: kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, dan kompetensi. Populasi pada penelitian ini yakni pemerintah desa yang tersebar pada 10 desa dan 14 kelurahan pada kecamatan Sidoarjo yang berjumlah 190 orang, sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 69 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam teknik ini hanya mengambil pegawai-pegawai pemerintah desa yang memiliki standar pengalaman kerja minimal satu tahun dan yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa.

Data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dengan menggunakan kuesioner. Variabel independen pada penelitian ini yakni kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi dan kompetensi. Sedangkan untuk variabel dependen yakni kecurangan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo, budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo, sedangkan untuk kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo.

SUMMARY

The Impact Of Diamond Fraud On Fraud Village Financial Management (Studi Case In The Village Government Sidoarjo Sub-District); Sri Puspita Sari; 160810301127; 71 pages; Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Fraud is intentional or unintentional fraud committed by individuals or groups in order to obtain something that is desired by harming others. In Indonesia, fraud has often occurred among government agencies, because government agencies are complex organizational structures, complicated bureaucratic systems, low control systems, and high pressures. Corruption is one of the many accounting frauds committed by perpetrators of fraud.

In 2018 Indonesia Corruption Watch recorded 1,087 cases of corruption. There are around 139 regional and village heads who commit acts of corruption. Acts of corruption involving regional heads and village heads most often occur in East Java Province with 68 acts of corruption that cost Rp. 90.2 M.

In the government sector in Sidoarjo also involved several acts of fraud: 1) the construction of TPST which cost Rp. 590 Million conducted by one civil servant; 2) apbdes corruption amounting to Rp. 227 million who dragged the Wonokupang village head; 3) the village head of Pewasahan who embezzled village funds in the amount of Rp. 52 Million; 4) the village head of Glagah Arum committed apbdes corruption in the amount of Rp. 225 Million; 5) treasurer of the village of Pilang doing apbdes which spent Rp. 600 million.

Factors that encourage fraud due to the lack of compensation received by village government officials are low even not comparable with what has been done, there is no transparency in carrying out all activities related to village funds or those that are not directly related to village funds, as well as supported by supervision, poor organizational culture that is applied and competencies held by village government officials who are weak or inadequate to be able to provide services to the community. There are several studies that have been done that show that diamond fraud affects fraud actions.

This study aims to determine the factors that trigger the occurrence of fraudulent actions that use diamond fraud as a basis for taking, namely: the suitability of compensation, the government's internal control system, organizational culture, and competence. The population in this study is the village government which is spread in 10 villages and 14 villages in Sidoarjo subdistrict, amounting to 190 people, the sample used in this study as many as 69 people using purposive sampling techniques, where in this technique only take village government officials who have a minimum work experience standard of one year and who understands village financial management.

The data used in this study are primary data using a questionnaire. The independent variables in this study are the suitability of compensation, the government's internal control system, organizational culture and competence. As for the dependent variable, cheating. The results of this study indicate that the suitability of compensation has a significant negative effect on fraud in village financial management in Sidoarjo District, the government internal control system has a significant negative effect on fraud in village financial management in Sidoarjo District, organizational culture has a significant negative effect on fraud in village financial management in Sidoarjo District, while competency has a significant positive effect on fraud in village financial management in Sidoarjo District.

PRAKATA

Ya Allah Ya Rahman Allahamdulillah atas berkah, hidayah dan rahmat -Mu saya bisa menyelesaikan tanggung jawab dan tugas sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Fraud Diamond* Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Kecamatan Sidoarjo)” sesuai dengan waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dalam pembuatan skripsi ini tidak luput dari bantuan orang-orang disekitar, maka sebab itu saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan, kekuatan, dan kelancaran bagi saya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya;
2. Keluarga saya Ibu Purwaningsih, Bapak Supriyono, dan Ketiga Kakak saya Eko Wahyono, Dwi Surya, Try Nur Fauzi yang selalu memberi semangat, dukungan, doanya serta pembelajaran yang tidak ternilai;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ibu Kartika S.E., M.Sc., Ak. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak. selaku pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan pengetahuan, bimbingan, saran serta bersedia meluangkan waktunya;
7. Ibu Bunga Maharani S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasihat dan motivasi;
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan;

9. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khusus Program Studi S1 Akuntansi yang telah membantu dalam memenuhi kelengkapan berkas persyaratan kelulusan.
10. Faishal Fatkhurozzi dan Keluarga yang selalu memberikan semangat, doa, kekuatan, serta bantuannya yang begitu banyak selama menyelesaikan skripsi;
11. Sahabat-sahabat saya, kakak adik teman kosan Brantas 21, teman-teman Sekolah Menengah Kejuruan, teman-teman Mahadelta dan teman-teman KKN 27 Bondowoso yang memberikan semangat, dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak dapat memberikan semangat. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 10 April 2020

Penulis

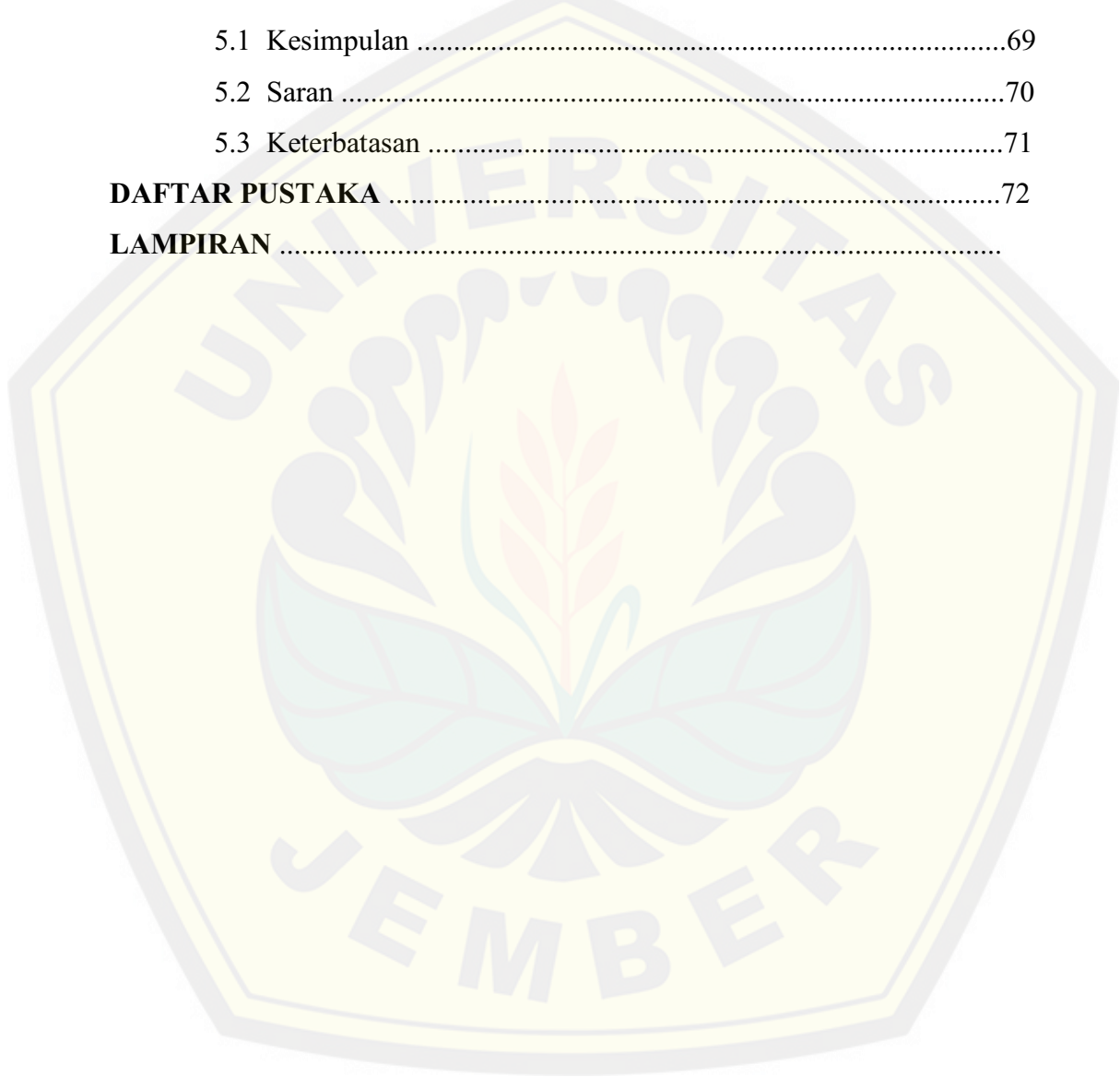
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	11
2.1.1.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	12
2.1.1.2 Tujuan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	13
2.1.2 Teori Kecurangan	14
2.1.2.1 Klasifikasi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	15

2.1.3	Teori <i>Fraud Triangle</i>	16
2.1.4	Teori <i>Fraud Diamond</i>	19
2.1.5	Pemerintah Desa	21
2.1.5.1	Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.1.5.2	Asas Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.1.6	<i>Fraud</i> dalam Sektor Pemerintah Desa	22
2.2	Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan (<i>Fraud</i>)	23
2.2.1	Kesesuaian Kompensasi	23
2.2.2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	24
2.2.3	Budaya Organisasi	25
2.2.4	Kompetensi	26
2.3	Penelitian Terdahulu	27
2.4	Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.4.2	Pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.4.3	Pengaruh Budaya Organisasi terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	37
2.4.4	Pengaruh Kompetensi terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	38
2.5	Kerangka Konseptual Penelitian	39
BAB 3.	METODE PENELITIAN	40
3.1	Desain Penelitian	40
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	41
3.4	Jenis dan Metode Pengumpulan Data	41
3.4.1	Jenis Data	41
3.4.2	Metode Pengumpulan Data	42
3.5	Definisi Operasional Variabel Penelitian	42
3.5.1	Variabel Dependen	43

3.5.2 Variabel Independen	43
3.5.2.1 Kesesuaian Kompensasi	43
3.5.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	44
3.5.2.3 Budaya Organisasi	44
3.5.2.4 Kompetensi	45
3.6 Analisis Data	45
3.6.1 Statistika Deskriptif	46
3.6.2 Uji Kualitas Data	46
3.6.2.1 Uji Validitas	46
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	47
3.6.3.1 Uji Normalitas Data	47
3.6.3.2 Uji Multikolinieritas	47
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	48
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda	48
3.6.5 Uji Hipotesis	49
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Penjelasan Objek Penelitian	51
4.1.2 Penjelasan Tipe-Tipe Responde	52
4.1.3 Penjelasan Variabel Penelitian	53
4.1.4 Uji Kualitas Data	56
4.1.4.1 Uji Validitas	57
4.1.4.2 Uji Reliabilitas	58
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	59
4.1.5.1 Uji Normalitas	59
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas	60
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas	61
4.1.6 Analisis Regresi Berganda	61
4.1.7 Uji Hipotesis	63

4.1.7.1 Pengujian F (Uji Simultan)	63
4.1.7.2 Pengujian t	64
4.1.7.3 Koefesien Determinasi	65
4.2 Pembahasan	65
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
5.3 Keterbatasan	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	31
3.1 Tabel Pengukuran Skala <i>Likert</i>	42
4.1 Tabel Sampel Penelitian	51
4.2 Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja	52
4.3 Frekuensi Responden Berdasarkan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa	53
4.4 Frekuensi Responden Variabel Kesesuaian Kompensasi (X1)	53
4.5 Frekuensi Responden Variabel SPIP (X2)	54
4.6 Frekuensi Responden Variabel Budaya Organisasi (X3)	55
4.7 Frekuensi Responden Variabel Kompetensi (X4)	55
4.8 Frekuensi Responden Variabel Kecurangan (Y1)	56
4.9 Hasil Uji Validitas	57
4.10 Hasil Uji Reliabilitas	59
4.11 Hasil Multikolinieritas Kecurangan	60
4.12 Hasil Regresi X terhadap Y	62
4.13 Hasil Uji F Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, SPIP, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Kecurangan	64
4.14 Hasil Uji t X1, X2, X3, dan X4 Terhadap Y1	64
4.15 Hasil Koefisien Determinasi Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, SPIP, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Kecurangan	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Kecurangan Akuntansi	1
1.2 Ranking Kasus Korupsi 2018	2
2.1 <i>The Fraud Tree: Occupational Fraud and Abuse Classification System</i>	15
2.2 Teori Segitiga Kecurangan (<i>fraud triangle</i>)	16
2.3 Teori Berlian Kecurangan (<i>fraud diamond</i>)	19
2.4 Kerangka Pemikiran	39
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	50
4.1 Kurva P-P Plot Kecurangan	60
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Kecurangan	61

DAFTAR LAMPIRAN

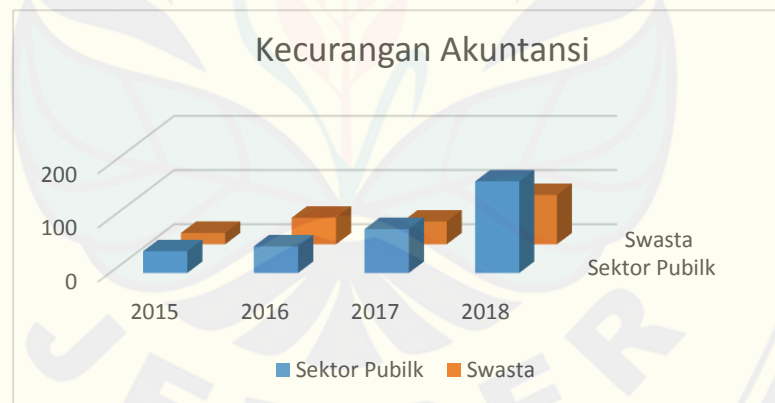
1. Kuesioner
2. Hasil Kuesioner
3. Statistika Deskriptif
4. Frekuensi Karakteristik
5. Frekuensi Responden
6. Uji Validitas
7. Uji Reliabilitas
8. Uji Normalitas
9. Uji Multikolinier
10. Uji Heteroskedastisitas
11. Uji Hipotesis



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) merupakan perilaku penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara merugikan orang lain. (ACFE, 2016) *Association of Certified Fraud Examiner* menjelaskan, *fraud* merupakan perilaku yang sengaja dilakukan guna melakukan penipuan kepada pihak tertentu untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi di pelaku kecurangan tersebut. (ACFE, 2016) membagi jenis-jenis *fraud* menjadi tiga golongan, yaitu: penyalahgunaan aset, penyimpangan pelaporan keuangan, dan korupsi. Menurut (IAI, 2012) *Fraud* adalah kecurangan yang dalam pelaporan keuangan berupa salah saji yang dilakukan secara sengaja guna untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan timbulnya perlakuan yang tidak wajar terhadap aktiva yang tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.



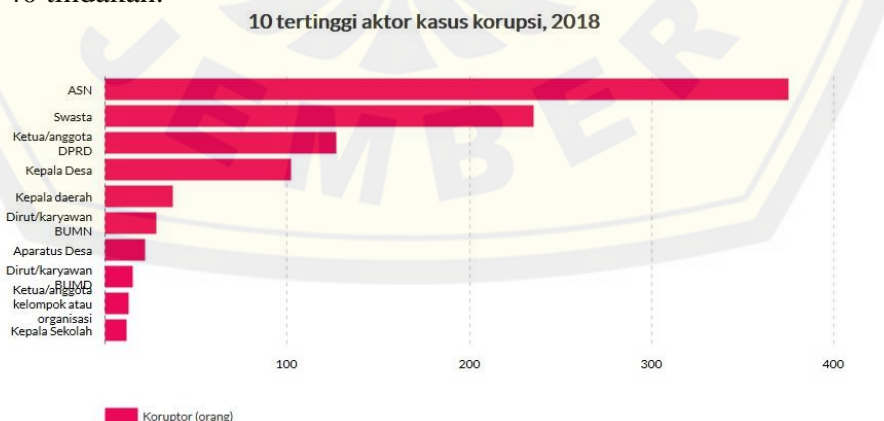
Gambar 1.1 Kecurangan Akuntansi (Sumber: kpk.go.id)

Di Indonesia tindakan kecurangan akuntansi dibagi menjadi dua sektor, yaitu: sektor publik (instansi pemerintah) dan sektor swasta (komersial). Menurut Sulastri dan Simanjuntak (2014) bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi banyak terjadi dikalangan instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi. Korupsi merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan oleh para pelaku *fraud*

(Wilopo, 2006). Korupsi banyak muncul dinegara-negara berkembang, karena para pelaku *fraud* berlomba-lomba untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, sifat yang rakus, penegak hukum yang lemah, serta rendahnya tingkat kesadaran akan moral yang baik. Pada instansi pemerintah sendiri telah banyak ditemukan tindakan korupsi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam *Indeks Persepsi Korupsi* (IPK) 2018 menyebutkan Indonesia menempati peringkat 89 dengan jumlah negara 180 dengan skor 38. Berdasarkan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) skor tahun 2018 Indonesia mengalami kenaikan satu poin yang sebelumnya pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ke 96 dengan jumlah negara 180 dengan skor 37. Pada lingkup di negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah negara Singapura dengan skor 85, Brunei Darussalam dengan skor 63, dan Malaysia dengan skor 55 sedangkan Indonesia memiliki skor 47. Hasil ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih berada dibawah angka rata-rata CPI Internasional.

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2018 terdapat 1.087 tersangka yang terjerat tindakan korupsi. ICW mencatat ada sekitar 139 kepala daerah maupun kepala desa yang melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun kepala desa paling sering terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan 68 tindakan korupsi yang menghabiskan Rp. 90,2 M, disusul Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 647 M dengan 42 tindakan dan Sumatera Utara dengan 40 tindakan.



Gambar 1.2 Ranking Kasus Korupsi 2018 (Sumber: antikorupsi.org)

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, dimana ibu kotanya terletak pada Kabupaten Sidoarjo itu sendiri. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kota perekonomian bagi Kota Surabaya dan kawasan Gerbangkertosusila, karena terdapat berbagai potensi usaha pada bidang industri, perdagangan, pariwisata dan usaha-usaha kecil menengah serta letak wilayah yang strategis dan sumber daya manusia yang memadai. Maka perkembangan Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi daerah yang menjanjikan bagi pengembangan perekonomian regional.

Tetapi sangat disayangkan, perkembangan perekonomian ini tidak dibarengi oleh sikap atau perilaku yang baik, sebagai contoh banyak ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para pegawai pemerintah di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 terdapat kasus korupsi proyek pembangunan TPST sebesar Rp. 590 Juta yang salah seorang PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Pada tahun 2017 terdapat kasus korupsi APBDes sebesar Rp. 227 Juta yang menyeret Kepala Desa Wonokupang. Sedangkan tahun 2016 dan 2015 ditemukan Kepala Desa Pewasahan dan Kepala desa Glagah Arum melakukan korupsi APBDes 2016 yang mengakibatkan kerugian Rp. 52 Juta dan Rp. 225 Juta, sedangkan pada 2015 terdapat Bendahara Desa Pilang melakukan APBDes yang menghabiskan Rp. 600 Juta (sumber: bangsaonline.com_korupsi-sidoarjo).

Pada awal tahun 2015 pemerintah pusat resmi menerapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana undang-undang mengatur dan mengelola keuangan desa yang dialokasikan khusus pada APBN. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa disebut dana desa. Definisi dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah yang berasal dari APBN. Dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, guna untuk pemerataan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur di desa.

Pada awal penerapan undang-undang tersebut pemerintah pusat telah mengeluarkan dana desa sebanyak Rp. 20,8 Triliun dengan penyerapan sebesar 82,72%. Pengalokasian dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dana yang dikeluarkan sebanyak Rp. 47 Triliun penyerapan sebesar

97,65%. Pada tahun 2017 dana yang dikeluarkan sebanyak Rp. 60 Triliun penyerapan sebesar 98,54%. Sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai daya serap sebesar 99% (sumber: databoks.katadata.co.id).

Anggaran yang masuk dalam alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan desa, pembuatan saluran air didesa, pelayanan posyandu, ketersediaan air bersih, pembangunan atau perbaikan sekolah-sekolah dan kebutuhan lainnya yang digunakan untuk masyarakat desa. Hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar bisa lebih produktif dan mandiri. Alokasi dana desa yang tersalurkan sejak tahun 2015 sebesar Rp. 186 Triliun dan telah dialokasikan kepada 74.954 desa yang ada di Indonesia. Dengan adanya dana desa yang cukup besar membuat pemerintah pusat harus lebih teletu dan mengawasi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana tersebut agar tercapainya tujuan dalam UU nomer 6 tahun 2014.

Tetapi praktiknya dana desa menjadi tujuan utama seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Egi Primayogha peneliti dari ICW tahun 2015 tercatat ada 17 kasus korupsi yang menjerat 15 kepala desa, sedangkan pada tahun kedua bertambah 32 kepala desa yang menjadi tersangka dengan 41 kasus korupsi. Pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing tercatat sebanyak 65 kepala desa yang menjadi tersangka dengan total 96 kasus dan 27 kasus pada awal tahun hingga pertengahan tahun 2018 yang menjerat sebanyak 29 kepala desa. Sehingga sejak tahun 2015 hingga 2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang merugikan Indonesia sebanyak Rp. 40,6 miliar yang menjerat 141 kepala desa. ICW menilai meningkatnya kasus korupsi dana desa ini karena minimnya kompetensi pegawai pemerintah desa, tidak adanya transparansi serta didukung oleh pengawasan yang lemah.

Faktor pendukung itulah yang menjadikan para pelaku tindakan kecurangan dapat dengan mudah melakukan korupsi. Faktor utama seseorang melakukan tindakan kecurangan karena merasa kompensasi yang diterima sangat rendah bahkan tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakaan, sehingga banyak pegawai yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kasus korupsi yang biasanya terjadi dikalangan pegawai-pegawai berupa

menyelahgunaan anggaran infrastruktur, anggaran belanja, anggaran dalam tugas keluar kota. Faktor penyebab terjadinya kecurangan menurut teori *diamond fraud* adalah *capability* sebagai faktor penentu terjadinya kecurangan. *Triangle fraud* yang dipaparkan oleh Cressey disempurnakan dalam bentuk *diamond fraud* dimana teori kecurangan ini terdapat 4 elemen, yaitu: *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*.

Pressure merupakan salah satu elemen untuk melakukan kecurangan agar dapat memenuhi gaya hidup dan kebutuhan ekonomi. Berbagai gaya hidup dan kebutuhan ekonomi yang sangat banyak mampu membuat seseorang untuk melakukan segala tindakan kecurangan agar dapat memenuhi keinginannya. Menurut SAS No. 99, ada empat jenis *pressure* yang mengakibatkan kecurangan karena adanya *financial stability*, *extrenal pressure*, *personal financial need* dan *financial targets*. Pada *pressure* ini diprosikan sebagai kesesuaian kompensasi.

Kompensasi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas kerja kerasnya kepada perusahaan atau organisasi (Ardana. 2012:153). Sedangkan menurut Sastrohadiwiryono (2011:125), kompensasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada pegawai, karena telah melakukan pekerjaan dalam bentuk tenaga maupun pemikiran untuk dapat memajukan perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada para pegawai dapat membuat pegawai terdorong untuk selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar serta berguna untuk mengurangi adanya tindakan kecurangan.

Opportunity merupakan peluang yang terdapat dalam organisasi yang dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan kecurangannya yang didukung oleh lemahnya sistem pengendalian intern, kurangnya kedisiplinan pegawai, serta lemahnya mekanisme audit. Pengendalian intern menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan setiap organisasi, apabila sebuah pengendalian internnya lemah maka akan banyak timbul kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai. Pada *opportunity* ini diprosikan sebagai sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan peraturan atau kebijakan suatu perusahaan dalam melakukan perlindungan atas kekayaan dari adanya tindakan kecurangan, menjamin informasi yang diberikan akurat, serta melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku apakah sudah dijalankan dengan semestinya oleh para pegawai (Hery, 2013:159). Menurut Ardiyos dalam buku Tuty (2012:11), sistem pengendalian intern merupakan sistem terstruktur otomatis yang saling berhubungan antara bagian satu dengan lainnya dalam melakukan pekerjaannya. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan tata kelola pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang *good govermence* serta dalam meningkatkan tujuan dan sarana yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dan benar dapat memudahkan perusahaan atau organisasi dalam melakukan pekerjaan serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan dapat mengetahui apakah terjadi tindakan kecurangan dalam perusahaan ataupun organisasi.

Rationalization merupakan elemen yang sulit untuk diukur karena sebuah pemikiran seseorang yang selalu membenarkan semua perbuatan yang dilakukannya, maka hal ini yang menimbulkan berbagai tindakan kecurangan. Mustikakasari (2013) memaparkan sikap komitmen manajemen yang baik dapat menghasilkan individu yang sesuai dengan norma-norma serta didukung dengan budaya organisasi yang baik akan menjauhkan seseorang tersebut dari tindakan kecurangan. Pada *rationalization* ini diprosikan sebagai budaya organisasi.

Budaya organisasi adalah sikap dan perilaku yang dilakukan oleh dalam organisasi yang berhubungan dengan lingkungan intern maupun ekstern (Ernie 2006:71). Sedangkan menurut Griffin (2004:162), budaya organisasi yaitu kumpulan nilai, keyakinan serta kebiasaan yang digunakan anggota organisasi dalam memahami peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem yang dibuat secara formal yang dilakukan dua orang atau lebih guna mencapai tujuan (Hasibuan, 2007:202). Dengan begitu budaya organisasi merupakan nilai sikap yang terpendam dalam diri individu pada saat melakukan ataupun menjalankan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tata kelola budaya organisasi yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan, karena budaya

organisasi yang digunakan membuat para pegawai untuk melaksanakan dan mematuhi akan peraturan yang berlaku.

Capability merupakan perilaku yang dimiliki oleh pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan yang didukung dengan kesempatan yang ada. Kemampuan individu adalah sifat yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan kemampuan yang mendorong pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan (Wolfe dan Hermason: 2004). Pada *capability* ini diprosikan sebagai kompetensi yang dimiliki seseorang tersebut.

Kompetensi merupakan bakat yang sudah ada sejak lahir, adanya proses dalam belajar, serta adanya pengalaman dalam melakukan pekerjaan (Sigit: 2003:24). Sedangkan menurut Kreitner (2005:185), kemampuan merupakan sikap yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi tindakan ataupun permasalahan tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Kemampuan merupakan sifat yang dimiliki oleh individu yang berasal dari bawaan lahir atau dalam proses belajar untuk menyelesaikan pekerjaan (Soelaiman, 2007:112). Dimana kompetensi merupakan sikap yang terdapat dalam diri individu yang sudah ada sejak lahir maupun melalui proses belajar yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan pekerjaan atau melakukan segala sesuatu. Dengan adanya kompetensi yang terdapat dalam diri individu dapat menjadi dorongan untuk melakukan segala cara, baik itu cara yang baik maupun dalam melakukan cara yang buruk, seperti melakukan tindakan kecurangan.

Telah banyak peneliti yang meneliti faktor mendorong adanya tindakan kecurangan. Fitriana, A (2010) meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Intern dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pura Group di Kab. Kudus. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan dengan pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi sebagai variabel independen pada Pura Group yang terdapat pada Kabupaten Kudus. Hal ini diperkuat oleh Zulkarnain (2013) meneliti Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Dinas Kota Surakarta, yang menghasilkan kecurangan sektor pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel independen pengendalian intern, kesesuaian kompensasi serta

gaya kepemimpinan, untuk perilaku tidak etis pengaruh positif dengan kecurangan, sedangkan kultur organisasi tidak berpengaruh dengan kecurangan dan penegakan hukum menunjukkan terdapat pengaruh dengan kecurangan pada sektor pemerintahan.

Kedua penelitian tersebut juga diperkuat oleh hasil dari Wijayanti Dan Hanafi (2018) tentang Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa. Dimana hasil yang menunjukkan karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu berpengaruh negatif signifikan pada kecenderungan *fraud*. Penelitian tersebut diperkuat oleh Afsari, S.F (2016) yang menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan *Fraud* Di Sektor Pemerintahan Di Kabupaten Jember. Dimana hasilnya kecurangan dapat dipengaruhi secara positif dengan adanya kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi. Untuk gaya kepemimpinan, pengendalian intern, penegakan peraturan dan budaya etis tidak berpengaruh pada sektor pemerintahan. Hasil itu diperkuat oleh Laksmi dan Sujana (2019) Meneliti Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan moralitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap menghindarkan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. artinya kecurangan pada pemerintah desa dapat dicegah dengan pengendalian intern yang kuat, pemberian kompensasi yang sesuai dan moralitas yang baik. Selain dari beberapa penelitian diatas juga terdapat peneliti-peneliti yang mengupas tentang kecurangan dalam sektor pemerintahan, seperti: Kurniawan (2013), Noviriantin, Darmawan dan Werasturi (2015), Wulandari (2016), Sari, Arza dan Taqwa (2019).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa peneliti diatas masih terlihat bahwa hasil penelitian masih belum menunjukkan hasil yang sejalan sehingga terdapat beberapa variabel yang menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Sidoarjo yang lebih tepatnya desa-desa yang terdapat di Kecamatan Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dalam penelitian dirumuskan kedalam bentuk pertanyaan sebagaia berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa;
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa;
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa;
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman terhadap implementasi ilmu akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi pemerintahan mengenai kecurangan dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kecurangan yang dapat terjadi pada pengelolaan keuangan pemerintah desa dan faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kecurangan sehingga pegawai pemerintah desa dapat melakukan tindakan untuk mengurangi perilaku kecurangan tersebut.

b. Bagi Peneliti

Hasil ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu tentang faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan pemerintah desa dan peneliti dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam sehari-hari untuk memecahkan masalah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi maupun menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain dalam bidang akuntansi pemerintahan mengenai kecurangan dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan teori yang tentang bagaimana cara tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. GCG tidak hanya digunakan pada perusahaan saja, tetapi GCG juga dipergunakan untuk mengatur tata kelola pada sektor pemerintahan. Menurut Adrian (2012:1), GCG adalah proses dan struktur yang digunakan oleh seseorang yang berkepentingan pada perusahaan (pemegang saham, komisaris, dewan pengawas dan deraksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Pada sektor pemerintahan *good governance* digunakan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat. Menurut Lembaga Administrasi Negara, *good governance* merupakan sistem yang dilakukan pemerintahan guna menjalankan tanggung jawab serta efektif dan efisien dalam mempertahankan hubungan antara pimpinan negara, sektor swasta maupun masyarakat. *Good governance* yang baik akan menghasilkan pemerintah yang bebas akan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance pada sektor pemerintahan merupakan konsep yang digunakan untuk mencapai keputusan bersama yang dicapai oleh pemerintah, masyarakat serta sektor swasta dalam menjalankan negara. Di Indonesia sendiri penerapan *good governance* dilakukan setelah terjadinya era reformasi yang telah merubah semua sistem pemerintahan yang sesuai dengan demokrasi. Akan tetapi penerapan prinsip *good governance* pada pemerintah masih belum membuahkan hasil, dimana pada sektor pemerintahan masih banyak ditemui kasus-kasus kecurangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi.

2.1.1.1 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk mencapai pemerintah yang *good governance* tidak lepas dari peran pemerintah (penyelenggara negara), pihak yang menggerakkan ekonomi (pihak dunia usaha), dan masyarakat. Peran dari ketiga pihak tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pemerintah dalam menjalankan tujuannya. Tetapi di Indonesia masih sangat sulit untuk menjalankan pemerintahan yang *good governance*, sebab masih banyak ditemui tindakan-tindakan yang merugikan negara.

Dengan adanya tindakan-tindakan tersebut pemerintah harus lebih ketat lagi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Menurut Hardjosoemantri (2003:5) terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijalankan oleh pemerintah agar dapat menciptakan pemerintahan yang *good governance*, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Partisipasi, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus memadai aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak.
- b. Penegakan hukum harus berjalan dengan adil dan berlaku untuk semua kalangan. Pemerintah harus melakukan pengawasan dalam penegakan hukum guna tercapainya pemerintahan yang *good governane*.
- c. Transparansi, struktur maupun proses yang dijalankan pemerintah harus dilakukan secara terbuka serta informasi yang disediakan pemerintah harus mudah dimengerti oleh semua pihak.
- d. Peduli dengan pelaku usaha, sektor pemerintah melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa pandang bulu.
- e. Berorientasi pada konsensus, dalam pengambilan keputusan musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan yang berguna bagi semua kalangan.
- f. Keadilan dan kesetaraan, pemerintah memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil, tanpa melihat dari lembaga ataupun kalangan mana.
- g. Akuntabilitas, pengambil keputusan pada sektor publik maupun sektor swasta bertanggung jawab kepada masyarakat ataupun lembaga yang berkepentingan.
- h. Efektifitas dan efisiensi, struktur pemerintahan yang menghasilkan kebutuhan bagi masyarakat dengan menggunakan sumber daya dengan seoptimal mungkin.

- i. Wawasan ke depan, pihak pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang luas atas tata kelola pemerintah untuk memajukan negara.
- j. Pengawasan, melaksanakan serta menjalankan sistem pengawasan pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur negara dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.

2.1.1.2 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Good governance merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik, oleh karena itu struktur pemerintah harus memiliki pembagian bidang yang baik untuk bisa menjalankan tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Effendi, 2005:1), yaitu:

1. Politik merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat terwujudnya pemerintahan *good governance*. Konsep politik yang tidak baik bahkan tidak menjalankan sistem demokrasi akan membuat krisis politik yang tidak sehat. Maka dari itu perlu dilakukannya perubahan sistem politik yang mengacu kepada UUD NKRI 1945.
2. Ekonomi, perekonomian Indonesia saat ini masih terbilang mengalami krisis, sebab masih banyak masyarakat yang belum sejahtera yang berdampak pada masalah sosial yang akan mengganggu kinerja pemerintah secara menyeluruh.
3. Sosial, untuk mewujudkan pemerintahan *good governance* kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting. Masyarakat diberikan wewenang untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah, tetapi nyatanya masyarakat masih belum diberikan haknya.
4. Hukum merupakan hal penting mewujudkan *good governance*. Sebab penegakan hukum yang baik akan melahirkan SDM dan sistem dalam menjalankan tugas serta penegakan hukum dianggap lembaga yang adil.

2.1.2 Teori Kecurangan

2.1.2.1 Definisi Kecurangan

Kecurangan menurut Tuanakotta (2013:28), perilaku tidak sah yang dilakukan dengan cara menipu daya, menyembunyikan atau melanggar kepercayaan yang dilakukan tanpa adanya ancaman kekerasan maupun perbuatan fisik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna menghasilkan uang, kekayaan atau jasa bahkan bisa menghindari dari pembayaran ataupun kerugian suatu bisnis. Hardianto (2011:3), perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam intern maupun ekstern organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara langsung tetapi dengan merugikan orang lain. Perbuatan ini termasuk berbohong, mencuri bahkan melakukan penggelapan kekayaan perusahaan yang tentunya akan merugikan perusahaan.

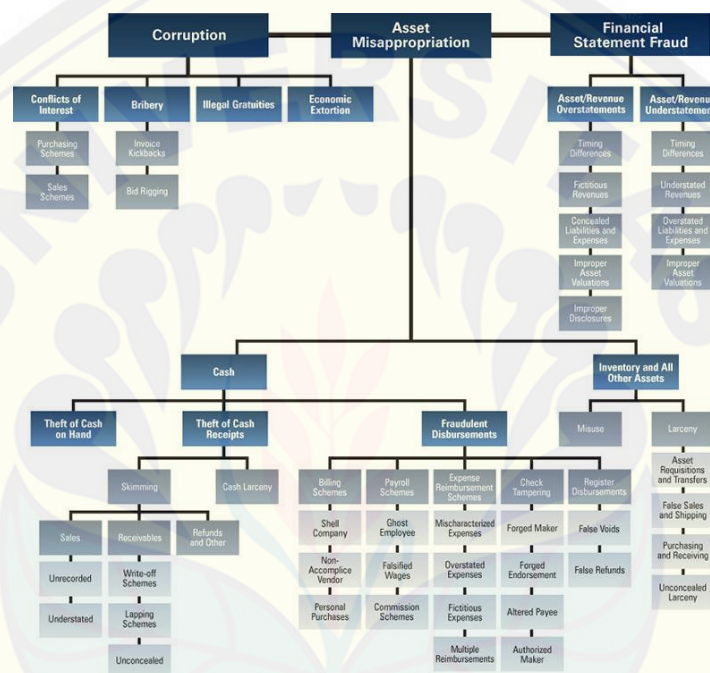
The Institute of Internal Auditor (IIA), kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik berupa penipuan yang dilakukan secara sengaja. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan individu maupun kelompok dengan cara merugikan organisasi secara intern maupun ekstern. Kecurangan dalam akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kecurangan yang timbul karena salah saji pada pelaporan keuangan yang dilakukan dengan cara menghilangkan atau melaporkan laporan keuangan dengan jumlah yang salah yang dilakukan dengan cara sengaja dan kecurangan yang timbul karena salah saji pada penyalahgunaan atau penggelapan terhadap aktiva yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Organisasi anti-fraud dunia *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* menyebutkan kecurangan adalah sikap yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh individu maupun untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan orang lain.

Dari beberapa pengertian kecurangan diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan individu maupun kelompok dengan cara mengambil hak ataupun merugikan orang lain. Di Indonesia sendiri kecurangan biasanya identik dengan kasus korupsi, tapi itu semua tidak benar. Kecurangan yang terjadi diperusahaan biasanya berupa penyimpangan pelaporan keuangan, penyalahgunaan

aset serta masih banyak lagi. Kecurangan dapat terjadi disemua kalangan, baik itu sektor pemerintah maupun sektor swasta.

2.1.2.2 Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Organisasi anti-fraud dunia *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* mengklasifikasikan kecurangan dalam tiga golongan atau biasanya disebut “*fraud tree*”.



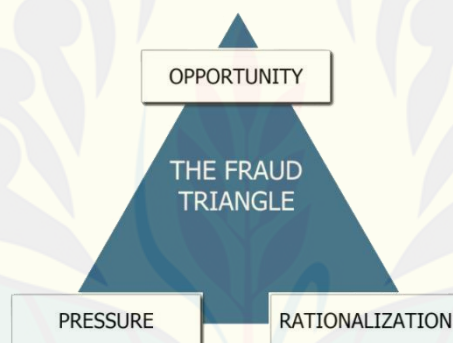
Gambar 2.1 The Fraud Tree: Occupational Fraud and Abuse Classification System (Sumber: ACFE, 2016)

- Korupsi merupakan kecurangan yang sulit dideteksi, sebab berhubungan secara langsung antara pelaku kecurangan. Kecurangan ini bisa terjadi karena adanya pengendalian intern serta penegakan hukum yang lemah serta didukung dengan tekanan akan gaya hidup yang mewah. Kecurangan ini biasanya berupa kasus penyuaipan, penyalahgunaan wewenang serta menerima gratifikasi dan masih banyak kasus-kasus lainnya.
- Penyimpangan atas aset merupakan kecurangan yang mudah untuk dideteksi, sebab kecurangan ini berbentuk dan dapat dihitung. Dimana penyimpangan atas aset biasanya berupa pencurian atas aset perusahaan, penyalahgunaan jabatan serta adanya pengendalian intern dan pengawasan yang lemah.

- c. Kecurangan pada laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan untuk menipu pemakai laporan keuangan dengan cara menampilkan laporan keuangan fiktif atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dimana kecurangan dalam laporan keuangan ini biasanya dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan maupun instansi pemerintah yang menginginkan keuntungan yang besar.

2.1.3 Teori *Fraud Triangle*

Donald R. Cressey pada tahun 1953 mengemukakan teori yang menjelaskan tentang faktor terjadinya kecurangan yang disebut dengan teori segitiga kecurangan atau "*fraud triangle*".



**Gambar 2.2 Teori Segitigas Kecurangan (*fraud triangle*),
Sumber (*The CPA Journal by Cressey: 1953*)**

Dalam teori *fraud triangle* terdapat tiga elemen penyebab terjadinya kecurangan, yaitu:

1. *Pressure* (tekanan)

Pressure merupakan situasi dimana pelaku kecurangan melakukan tindakannya didasari oleh adanya tekanan akan pekerjaan, dorongan untuk memenuhi gaya hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi maupun tekanan-tekanan yang bersifat non keuangan. Faktro-faktor yang menyebabkan tingkat *pressure* (tekanan) semakin tinggi, yaitu:

- a. *Financial Problem* atau masalah keuangan, dimana masalah ini timbul karena individu harus memenuhi kebutuhan yang melebihi dari kemampuan keuangannya, biaya kesehatan yang semakin mahal.

- b. *Non Financial Problems* atau masalah non keuangan, dimana masalah ini timbul karena adanya perilaku atau perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain karena adanya dua masalah diatas, *pressure* (tekanan) juga bisa timbul karena adanya *financial stability* seseorang akan melakukan berbagai cara agar dapat menjaga stabilitas keuangannya, *extrenal pressure* seseorang akan melakukan kecurangan karena ada tekanan dari luar, *personal financial need* seseorang akan melakukan kecurangan untuk memperoleh uang dan *financial targets* seseorang yang menginginkan target keuangan yang banyak tetapi tidak sejajar dengan hasil bekerjanya. (SAS No. 99). Dalam hal ini kecurangan yang didasari *pressure* dapat terjadi kapan dan dimana saja pada saat pelaku kecurangan merasa dirinya tertekan akan situasi yang sedang dihadapinya.

2. *Opportunity* (peluang)

Opportunity merupakan situasi dimana pelaku kecurangan melakukan tindakannya didasari oleh adanya kesempatan untuk melakukannya. Adanya kesempatan ini biasanya terjadinya karena sistem pengawasan yang lemah, pengendalian intern yang buruk dan penyalahgunaan wewenang dalam suatu organisasi. Bentuk kecurangan seperti ini sering sekali terjadi, apabila pengendalian yang lemah serta tidak adanya pengawasan yang baik maka akan terjadinya tindakan kecurangan. Oleh sebab itu pengawasan yang baik serta pengendalian intern yang baik sangatlah berpengaruh besar untuk mengurangi tindakan kecurangan. Faktor-faktor yang muncul dalam tindakan kecurangan:

- a. Sistem pengendalian intern yang lemah

Dalam menjalankan suatu organisasi sistem pengendalian intern yang baik sangat dibutuhkan, karena sistem pengendalian intern yang baik akan menghasilkan suatu organisasi yang bersih akan tindakan kecurangan, tindakan yang melanggar hukum serta tindakan-tindakan lainnya yang tentunya akan berdampak terhadap kelangsungan organisasi itu sendiri;

- b. Sistem pengawasan yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk

Dimana sistem pengawasan dan tata kelola organisasi yang baik dan benar perlu dilakukan dalam menjalankan suatu organisasi agar dapat mencapai

tujuan yang diinginkan, apabila sistem pengawasan dan tata kelola dalam organisasi itu buruk akan berdampak buruk terhadap suatu organisasi itu sendiri;

- c. Ketaatan atas peraturan yang tidak sesuai dengan jalan yang semestinya.

Peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi perlu ditaati dan dijalankan dengan semestinya, sebab peraturan tersebut akan membawa dan menghasilkan nilai positif bagi kelangsungan suatu organisasi tersebut;

- d. Lemahnya kedisiplinan dan pemberian sanksi.

Tingkat kedisiplinan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam suatu organisasi, dimana kedisiplinan dari para pegawai mempengaruhi akan kinerja dan hasil akan pekerjaan yang dilakukannya. Apabila ada pegawai yang melanggar peraturan atau tidak disiplin maka perlu adanya sanksi, dimana sanksi yang diberikan seharusnya tidak pandangbulu;

- e. Kurangnya sosialisasi dalam memahami keadaan yang sebenarnya sehingga jejak audit berkurang.

Suatu organisasi perlu melakukan sosialisasi kepada pegawai yang baru maupun pegawai yang lama tentang bagaimana cara memahami lingkungan sekitar, bagaimana menciptakan organisasi yang baik dan benar dan bagaimana untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kelangsungan dari suatu organisasi tersebut. Dimana sosialisasi ini dapat mengurangi akan adanya tindakan kecurangan;

- f. Lalai, tidak peduli dan tidak ada kesesuaian kemampuan pegawai.

Apabila suatu organisasi tidak melakukan pengawasan, tidak melihat lingkungan intern maupun ekstern dalam organisasi bahkan salah dalam memposisikan pegawai akan berpengaruh buruk akan keberhasilan organisasi.

3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Rationalization merupakan elemen yang sangat sulit untuk terdeteksi, dimana pelaku tindakan kecurangan dapat dengan mudah untuk mempengaruhi orang lain agar dapat percaya dengan apa yang dikatakannya. *Rationalization* merupakan perilaku atau pemikiran individu dalam menanggapi setiap perbuatan

yang dilakukannya itu benar dan tidak pernah ada salahnya. Perilaku atau pemikiran individu tersebut yang membuat munculnya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi. Menurut Kurniawan (2014), menyebutkan pelaku tindakan kecurangan memiliki beberapa alasan untuk dapat membenarkan setiap tindakan maupun pemikiran yang tidak sejalan dengan orang lain, contohnya: a) pelaku kecurangan beranggapan bahwa tindakan kecurangannya merupakan hal yang sudah biasa dan sering dilakukan oleh rekan sesama kerjanya, b) pelaku kecurangan merasa paling berjasa terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya, maka pelaku tersebut mengharuskan untuk mendapatkan kompensasi lebih dari apa yang telah diterimanya, (3) pelaku kecurangan beranggapan bahwa dirinya hanya meminjam uang maupun barang yang nantinya akan dikembalikan, 4) pelaku kecurangan beranggapan tindakan yang dilakukannya tidak melukai perasaan pihak lain dan beranggapan hanya masalah sederhana.

2.1.4 Teori *Fraud Diamond*

Teori *fraud diamond* dikemukakan oleh Wolfe dan Hermason pada tahun 2004 yang menyempurnakan teori dari Donald R. Cressey (1953) tentang teori segitiga kecurangan (*Triangle Fraud*). Dalam teori *fraud diamond* terdapat satu elemen baru, yaitu: *individual's capability* (kemampuan), dimana untuk meningkatkan pencegahan dan melakukan pendeteksian kecurangan perlu ada unsur tersebut.



Gambar 2.3 Teori Berlian Kecurangan (*fraud diamond*),

Sumber (The CPA Journal by Wolfe: 2004)

Capability (kemampuan)

Capability merupakan elemen baru yang digunakan untuk menyempurnakan dalam meningkatkan pencegahan dan melakukan pendeteksian kecurangan. *Capability* merupakan sifat yang dimiliki oleh individu dalam melakukan dan menjalankan tindakan kecurangan yang tentunya juga didukung dengan beberapa aspek lainnya, seperti: adanya dorongan akan tekanan pekerjaan, adanya pengendalian intern dan pengawasan yang lemah serta adanya perilaku yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Faktro-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kecurangan, yaitu:

a. *Posittion* (Posisi)

Posisi atau jabatan seseorang dapat memperluas peluang dalam melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Seseorang yang jabatan tertinggi dalam organisasi berpengaruh besar terhadap lingkungannya.

b. *Brain* (Kepintaran)

Seseorang pelaku *fraud* harus memiliki pengetahuan yang cukup dan mengetahui titik lemah pengendalian intern dan menggunakan posisi, fungsi atau akses yang berwenang untuk mengambil keuntungan.

c. *Convidence* (Ego)

Ego pelaku *fraud* sangat kuat dan memiliki keyakinan bahwa apapun dilakukannya tersebut tidak akan dapat terdeteksi. Sifat seperti ini biasanya termasuk seseorang yang memiliki sifat yang ambisi untuk berhasil dalam semua bidang tetapi dengan cara yang salah.

d. *Coercion skills* (Kemampuan dalam memaksa)

Seseorang pelaku *fraud* akan memaksa orang lain untuk melakukan ataupun menyembunyikan tindakan kecurangannya.

e. *Effecttive lying* (Kemampuan dalam berbohong)

Seseorang pelaku *fraud* akan merasa bangga apabila kecurangan yang dilakukannya tidak dapat dideteksi, dimana kemampuan berbohong yang baik dan konsisten untuk meyakinkan secara keseluruhan.

f. *Immunity to Stress* (Pengendalian stres)

Pelaku *fraud* harus mengendalikan stres atau mimik wajah agar dalam melakukan tindakan kecurangan dapat terjaga dan tidak diketahui pihak lain.

2.1.5 Pemerintah Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang terdapat diberbagai daerah, sebagai kumpulan kecil yang menetap pada lokasi tertentu yang digunakan untuk tempat tinggal (Sujarweni, 2015:7). Pemerintah desa merupakan organisasi atau lembaga pemerintah yang dudukannya dibawah pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang Desa “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Didalam Undang-Undang ini menyatakan desa dipimpin oleh kepala desa. Struktur pemerintah desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksana teknis yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2.1.5.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah proses dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengartikan kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa yang memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; menetapkan PTPKD; menetapkan petugas bagi pegawai pemerintah desa; menyetujui pengeluaran dalam APBDesa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBDesa.

2.1.5.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik serta transparan, akuntabel serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin (Sujarweni, 2015:27).

Berikut merupakan asas pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Transparan merupakan asas yang menjamin keterbukaan akses dan kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang pemerintah.
- b. Akuntabel merupakan asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna memperoleh pemerintahan yang *good governane*.
- c. Partisipasi merupakan asas yang dimana setiap warga desa yang bertempat tinggal didesa tersebut memiliki hak untuk memberikan masukan untuk pengambilan keputusan

2.1.6 *Fraud* dalam Sektor Pemerintah Desa

Kecurangan (*fraud*) telah tersebar diberbagai kalangan instansi pemerintahan. Kecurangan tidak hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja, tetapi kecurangan juga telah memasuki instansi pemerintahan terkecil yakni instansi pemerintah desa. Salah satu tindakan kecurangan yang terjadi dipemerintah desa yaitu penyalahgunaan keuangan desa. Maka perlu adanya pengawasan yang baik dari berbagai sektor pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan semestinya, serta didukung pengendalian intern desa yang kuat agar tidak terjadinya tindakan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa.

Kasus korupsi merupakan tindakan kecurangan yang paling sering dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dengan mudah melakukan penggantian anggaran keuangan desa yang tentunya akan berdampak pada kerugian negara. Kasus korupsi pada sektor pemerintah desa paling sering dilakukan oleh kepada desa itu sendiri, sebab jabatan yang tinggi serta wewenang yang kuat dapat dengan mudah untuk melakukan kecurangan. Tetapi dalam melakukan tindakan kecurangan tidak bisa dipungkiri kepala desa tetap dibantu oleh perangkat-perangkat desa untuk menjalankan tindakan kecurangan yang tentunya akan menguntungkan bagi dirinya sendiri.

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan (*Fraud*)

Faktor-faktor penyebab terjadi kecurangan (*fraud*) terdiri dari empat elemen, yakni *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. Dimana pada masing-masing elemen akan diakukan diproksikan secara berbeda. *Pressure* akan diproksikan dengan kesesuaian kompensasi. *Opportunity* akan diproksikan dengan sistem pengendalian intern pemerintah. *Rationalization* diproksikan dengan budaya organisasi. *Capability* diproksikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh individu.

2.2.1 Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan (Panggabean, 2004:76). Menurut Umar (2007:16), kompensasi merupakan semua bentuk yang diterima oleh pegawai yang berupa gaji, bonus, premi, pengobatan maupun asuransi yang langsung diberikan oleh perusahaan. Kompensasi adalah pemasukan yang berbentuk uang maupun barang yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas jasa yang dilakukan (Hasibuan, 2017:119). Menurut Nawawi (2011:316) kompensasi digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

- a. Kompensasi langsung adalah pemberian kompensasi kepada pegawai yang telah memberikan prestasinya untuk pencapaian tujuan. Kompensasi ini biasanya berupa pembayaran upah atau gaji, bonus atau insentif,
- b. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada pegawai guna meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kompensasi ini biasanya berupa tunjangan hari raya, tunjangan pensiun serta tunjangan kesehatan.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan kompensasi adalah pemberian yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi kepada para pegawai sebagai imbalan atau balas jasa atas pekerjaan dan kontibusinya dalam mencapai tujuan dari perusahaan maupun organisasi tersebut. Dimana pemberian kompensasi yang sesuai akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan para pegawai serta memotivasi kinerja pegawai dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan maupun organisasi. Apabila kompensasi yang diberikan tidak

selaras dengan semestinya, maka menimbulkan adanya tindakan kecurangan dalam perusahaan maupun organisasi.

2.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

Pengendalian intern merupakan struktur dan ukuran yang menjadi satu yang digunakan dalam menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013:163). Sedangkan menurut Hery (2013:159), pengendalian intern adalah kumpulan dari peraturan dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi aset serta kekayaan perusahaan dari tindakan kecurangan, menjaga ketersediaan informasi, dan memastikan bahwa semua peraturan hukum dilakukan dengan semestinya. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa *“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”*.

Menurut Agoes (2008:79), menyebutkan pengendalian intern merupakan proses yang harus dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan bagian penting dalam entitas yang membuat struktur untuk mencapai tujuan serta mendapatkan kepercayaan dalam melaporkan laporan keuangan, melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, dan kepatuhan akan peraturan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa komponen dalam sistem pengendalian intern yang saling berpengaruh dan berkaitan menurut Agoes, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian, dimana menjadi pondasi akan kesadaran dari sikap seseorang dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam organisasi.
- b. Penilaian risiko, dimana kebijakan serta prosedur yang telah ada dapat digunakan untuk membantu meyakinkan bahwa tugas dan perintah telah dilakukan dengan baik dan benar.

- c. Aktivitas pengendalian, dimana pengendalian merupakan kebijakan yang memudahkan organisasi dalam memperoleh informasi tentang pekerjaan ataupun perintah yang diberikan apakah sudah dilakukan.
- d. Informasi dan komunikatif, dimana pertukaran serta penangkapan informasi sangat dibutuhkan untuk keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab atas pekerjaannya.
- e. Pemantauan, proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja pegawai.

Dapat disimpulkan dari para ahli bahwa sistem pengendalian intern merupakan kerangka, pedoman, tata cara bagaimana perusahaan atau organisasi dapat menjalankan misi dan visi serta digunakan untuk menjaga kekayaan ataupun aset perusahaan atau organisasi dari adanya tindakan penyalahgunaan, menjaga ketersediaan informasi, dan memastikan bahwa semua peraturan hukum dilakukan dengan semestinya.

2.2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan yang dilakukan bersama-sama didalam organisasi yang berhubungan langsung dengan struktur formal untuk menghasilkan norma perilaku (Moeljono: 2004). muppass (2006:280) memaparkan terdapat empat karakteristik dasar pada budaya organisasi yang terdiri dari:

- a. Peraturan perilaku yang harus dipatuhi untuk digunakan sebagai pedoman dalam hubungan antara anggota organisasi, komunikasi, terminologi dan upacara;
- b. Filosofi, berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi, cara memperlakukan anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Aturan yang berisi petunjuk mengenai pelaksanaan tugas dalam organisasi;
- d. Iklim organisasi, menggambarkan lingkungan fisik organisasi, perilaku hubungan antara anggota serta hubungan dengan pihak luar organisasi.

Menurut Robbins (1996:289), budaya organisasi merupakan peraturan yang dilakukan oleh semua anggota yang terdapat dalam organisasi ataupun perusahaan.

Terdapat beberapa fungsi budaya organisasi, yaitu:

- a. Budaya yang menciptakan perbedaan yang jelas antar organisasi.
- b. Budaya yang membawa satu identitas bagi organisasinya.
- c. Budaya yang menimbulkan komitmen bersama secara luas.
- d. Budaya yang memperkuat persaudaraan antar organisasi maupun antar pegawai dengan atasan.
- e. Budaya yang bisa membentuk karakter ataupun cara pandang seseorang.

Dapat diambil kesimpulan dari pengertian para ahli bahwa budaya organisasi merupakan sarana untuk memperkuat dan memahami sifat atau watak seseorang yang terdapat didalam organisasi guna untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Budaya organisasi dalam sektor pemerintahan merupakan melakukan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pancasila dan undang-undang. Budaya organisasi yang baik pada sektor pemerintahan harus diwujudkan oleh pimpinan.

2.2.4 Kompetensi

Robbin (2007:38) kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan berbagai pekerjaannya, dimana kemampuan itu didukung dengan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi adalah kemampuan yang memadai untuk menjalankan sebuah tugas atau memiliki keterampilan dan kepintaran yang diisyaratkan (Suparno, 2012:27). Sutrisno (2016:7) kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja yang baik dalam pekerjaan, peran serta dalam situasi tertentu. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi yakni kemampuan bekerja individu yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Wibowo (2007:110) kompetensi yakni kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang didasari oleh sikap kerja, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Terdapat beberapa tipe karakteristik kompetensi, yaitu:

- a. Motif, keinginan seseorang dalam melakukan segala hal yang berupa tindakan ataupun pemikiran.
- b. Sifat, karakter fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi.

- c. Konsep, sikap serta nilai-nilai yang terdapat dari seseorang.
- d. Pengetahuan, kemampuan berfikir dalam mengerjakan segala hal yang dimiliki oleh seseorang.
- e. Keterampilan, kemampuan fisik dalam mengerjakan segala hal yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut pengertian para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa kompetensi merupakan faktor terbesar dalam keberhasilan suatu organisasi, dimana kompetensi itu kepribadian yang terdapat didalam pribadi dan melekat pada seseorang guna untuk melakukan semua tugas yang diembannya. Apabila kompetensi yang dimiliki seseorang tidak digunakan dengan semestinya mungkin akan terjadinya kecurangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Fitriana (2010) memberikan bukti pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pura Gruop yang terdapat pada Kab Kudus. Penelitian mengambil populasi seluruh pegawai pura dengan menggunakan *SmartPLS 2.0* untuk melakukan pengujian dan menganalisis data berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada pegawai. Kurniawan (2013) menganalisis pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan laporan keuangan (SKPD Kota Solok). Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Pemerintah Daerah khususnya dibidang pendidikan yang berada di Kota Padang. Teknik analisis adalah SPSS dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa moralitas dan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk hasil motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kecurangan pada laporan keuangan.

Penelitian Zulkarnain (2013) yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada dinas Kota Surakarta. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 115 pegawai instansi pemerintah Kota Surakarta dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Dimana penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui persepsi para pegawai pada instansi pemerintahan tentang faktor yang mendorong terjadinya kecurangan akuntansi, seperti: pengendalian intern, kesesuaian kompensasi yang diberikan, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan yang diterapkan, serta penegakan hukum yang berlaku pada instansi pemerintahan. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan. Untuk hasil penelitian yang lain menunjukkan pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan pada sektor pemerintahan, sedangkan untuk kultur organisasi menunjukkan tidak berpengaruh dengan kecurangan pada sektor pemerintahan dan penegakan hukum menunjukkan terdapat pengaruh dengan kecurangan pada sektor pemerintahan. Penelitian Noviriantin, Darmawan, dan Werastuti (2015) dimana penelitian ini juga menganalisis pengaruh budaya etis organisasi dan moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan (SKPD Kabupaten Jember). Sampel yang digunakan pada penelitian ini yang bekerja sebagai kepala bidang keuangan dan pegawai bidang keuangan yang berjumlah 88 responden dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan budaya etis organisasi dan moralitas aparat berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan disektor pemerintahan.

Penelitian Afsari, S.F (2016) dimana penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan *fraud* di sektor pemerintahan di Kabupaten Jember. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yang bekerja sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Petugas Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan disektor pemerintahan. Untuk hasil penelitian yang lain menunjukkan tidak berpengaruh antara gaya kepemimpinan, pengendalian intern, penegakan peraturan dan budaya etis dengan kecurangan pada sektor pemerintahan. Penelitian Wulandari dan Suryandari (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten

Temanggung. Jumlah populasi sebanyak 95 PNS yang bekerja pada bidang keuangan Kabupaten Temanggung dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian intern dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada sektor pemerintahan, hasil penelitian yang lain menunjukkan pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan pada sektor pemerintahan. Sedangkan untuk keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan hukum, dan kultur organisasi menunjukkan tidak berpengaruh dengan kecurangan pada sektor pemerintahan.

Ade (2017) meneliti tentang pengaruh ketaatan akuntansi, moralitas dan motivasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar). Sampel yang digunakan pada penelitian ini yang bekerja sebagai pimpinan SKPD, kepala bagian akuntansi dan staf akuntansi SKPD dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan menggunakan teknik analisis SPSS. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan akuntansi kepatuhan dan moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian Wijayanti dan Hanafi (2018) tentang pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 perangkat desa, tetapi yang dibuat sampel hanya di wilayah Demak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu berpengaruh negatif signifikan pada kecenderungan *fraud*.

Penelitian Sari, Arza dan Taqwa (2019), yang menganalisis pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. Populasi dalam penelitian ini desa-desa yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan. Penelitian Wirakusuma, dan Setiawan (2019), pengaruh pengendalian intern, kompetensi dan *locus of control* pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel yang digunakan pada penelitian

ini hanya 80 responden yang terdapat pada Kantor Pendapatan Kota. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian internal dan kompetensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan *locus of control* memiliki efek positif pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Laksmi dan Sujana (2019) meneliti pengaruh kompetensi sdm, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 27 Desa dengan 97 responden, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan menggunakan teknik analisis SPSS. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan moralitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, moralitas yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat, maka dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Putra dan Rahayu (2019) meneliti analisis *fraud diamond theory* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan guntur kabupaten demak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini seluruh perangkat desa yang terdapat pada Kecamatan Guntur dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan menggunakan teknik analisis SPSS. Dimana hasil menunjukkan bahwa tekanan dan peluang berpengaruh negatif signifikan pada pendeteksian penipuan. Sedangkan rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian penipuan penggunaan dana desa.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Fitriana, A (2010)	Pengaruh Pengendalian Intern dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pura Group di Kab. Kudus	Independen: pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi Dependen: kecurangan akuntansi (<i>fraud</i>)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi di Kab. Kudus
3	Kurniawan, G. (2013)	Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (SKPD Di Kota Solok)	Independen: moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern Dependen: kecurangan	Penelitian ini menunjukkan moralitas dan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan keuangan. Motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan laporan keuangan.
4	Zulkarnain (2013)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Dinas Kota Surakarta	Independen: pengendalian intern, kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, penegakan hukum. Dependen: kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif signifikan keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan terhadap <i>fraud</i> . Pengaruh positif signifikan perilaku tidak etis dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.

5	Noviriantini, Darmawan, dan Werastuti (2015)	Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (SKPD Kab Jembrana)	Independen: budaya etis organisasi dan moralitas aparat terhadap Dependen: kecenderungan kecurangan akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya etis organisasi dan moralitas aparat berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana
6	Afsari, S.F (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Di Sektor Pemerintah	Independen: kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, spip, penegakan peraturan dan budaya etis Dependen: kecurangan	Hasil menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif. Gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan dan budaya etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintah
7	Wulandari, R dan Suryandari D (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Independen: pengendalian internal, moralitas individu, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan sistem pengendalian internal, moralitas individu terhadap <i>fraud</i> , terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap <i>fraud</i> , tidak terdapat pengaruh keadilan distributif,

			organisasi, penegakan hukum Dependen: <i>fraud</i> pada satuan kerja pemerintah daerah	keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum terhadap <i>fraud</i> .
9	Ade, A. (2017)	Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar)	Independen: ketaatan akuntansi, moralitas dan motivasi Dependen: kecurangan akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan akuntansi kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi, motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
11	Wijayanti dan Hanafi (2018)	Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Pemerintahan Desa	Independen: karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu Dependen: <i>fraud</i>	Pada penelitian ini menunjukkan efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi dan berpengaruh negatif signifikan pada <i>fraud</i> . Sedangkan untuk karakteristik personal dan moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fraud</i>

12	Sari, Arza dan Taqwa (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa	Independen: akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern Dependen: potensi kecurangan dana desa	Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan.
13	Wirakusuma, dan Setiawan (2019)	Pengaruh Pengendalian Intern, Kompetensi dan <i>Locus of Control</i> Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Independen: pengendalian intern, kompetensi dan <i>locus of control</i> Dependen: kecurangan akuntansi	Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi berpengaruh negatif sig terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan <i>locus of control</i> memiliki efek positif pada kecurangan
14	Laksmi dan Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa	Independen: kompetensi sdm, moralitas dan sistem pengendalian internal Dependen: pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber, moralitas dan sistem kontrol internal daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

15	Putra dan Rahayu (2019)	Analisis <i>Fraud Diamond Theory</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	Independen: <i>pressure</i> , <i>opportunity</i> , <i>rationalization</i> dan <i>capability</i> Dependen: <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini menemukan <i>pressure</i> dan <i>opportunity</i> berpengaruh negatif signifikan pada <i>fraud</i> . Sedangkan <i>rationalization</i> dan <i>capability</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fraud</i> penggunaan dana desa.
----	-------------------------	--	---	--



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Kompensasi merupakan hak dari pegawai yang diberikan oleh atasan guna pekerjaan yang dilakukan berupa gaji, hadiah, bonus, serta asuransi yang dibayarkan kepada karyawan (Umar, 2007:34). Kesesuaian kompensasi merupakan hal yang penting bagi karyawan dan kelangsungan organisasi. Apabila hak yang diterima sebanding dengan pekerjaan, maka pegawai akan lebih produktif dalam melakukan segala sesuatu, sedangkan apabila hak yang diterima tidak sebanding karyawan akan melakukan segala cara untuk memperolehnya bahkan tidak segan untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal ini berpendapat lurus dengan pendapat Andrew di kutip oleh. Maka kesesuaian kompensasi harus dipertimbangkan agar karyawan tidak terdorong untuk melakukan tindakan *fraud*.

Hasil penelitian Fitriana (2010) menunjukkan kesesuaian kompensasi pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi di Kab. Kudus. Penelitian itu diperkuat oleh Zulkarnain serta Sari, Arza dan Taqwa (2019) menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara kesesuaian kompensasi terhadap tindakan *fraud* di sektor pemerintah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan apabila kesesuaian kompensasi yang diberikan sudah sesuai, maka kemungkinan kecil tindakan *fraud* terjadi.

H₁: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Boynton dkk (2003:373) pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh dean deraksi, manajemen, serta personel lain didalam entitas yang digunakan untuk menyediakan keyakinan guna mencapai tujuan. Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi kekayaan perusahaan dari bentuk tindakan penyalahgunaan, menjadinya tersedia informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta memastikan

bahwa peraturan-peraturan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang dan telah diatuhi oleh karyawan (Hery, 2013:159).

Hasil penelitian Fitriana (2010) menunjukkan pengendalian intern pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi di Kab. Kudus. Hasil itu diperkuat oleh Kurniawan G. (2013), Zulkarnain (2013), Wulandari dan Suryandari (2016), serta Wirakusuma dan Setiawan (2019) memaparkan hasilnya dimana sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Hasil dari kelima penelitian tersebut menjelaskan bahwa keefektifitas pengendalian internal yang baik dan benar akan menekan adanya kecenderungan *fraud* yang terjadi di sektor pemerintah.

H₂: Pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Luthans (1998:213) menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi untuk bisa berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku dilingkungan kerjanya. Budaya organisasi sebagai pandangan bersama yang dilakukan oleh anggota organisasi itu untuk memberikan penampilan berbeda dari organisasi lainnya (Robbins 2007). Budaya organisasi sangat perlu adanya dilingkungan organisasi, sebab dengan adanya budaya organisasi membuat semua pekerjaan atau peraturan bisa berjalan dengan semestinya.

Hasil penelitian Noviriantini, Darmawan, dan Werastuti (2015) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Hasil itu diperkuat oleh Wijayanti dan Hanafi (2018) menunjukkan hasil budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa budaya organisasi yang baik timbul karena adanya komunikasi yang baik antara semua karyawan dengan pimpinan, gaya pimpinan yang bisa mengajarkan karyawan, sikap memotivasi dan memberi kepercayaan kepada karyawan, serta adanya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan

yang berguna untuk keberhasilan organisasi. Pelaksanaan budaya organisasi yang baik pada pemerintah dapat menjadikan upaya bagi pemerintah dalam melaksanakan perannya untuk memperilakn pelayanannya kepada masyarakat.

H3: Budaya Organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

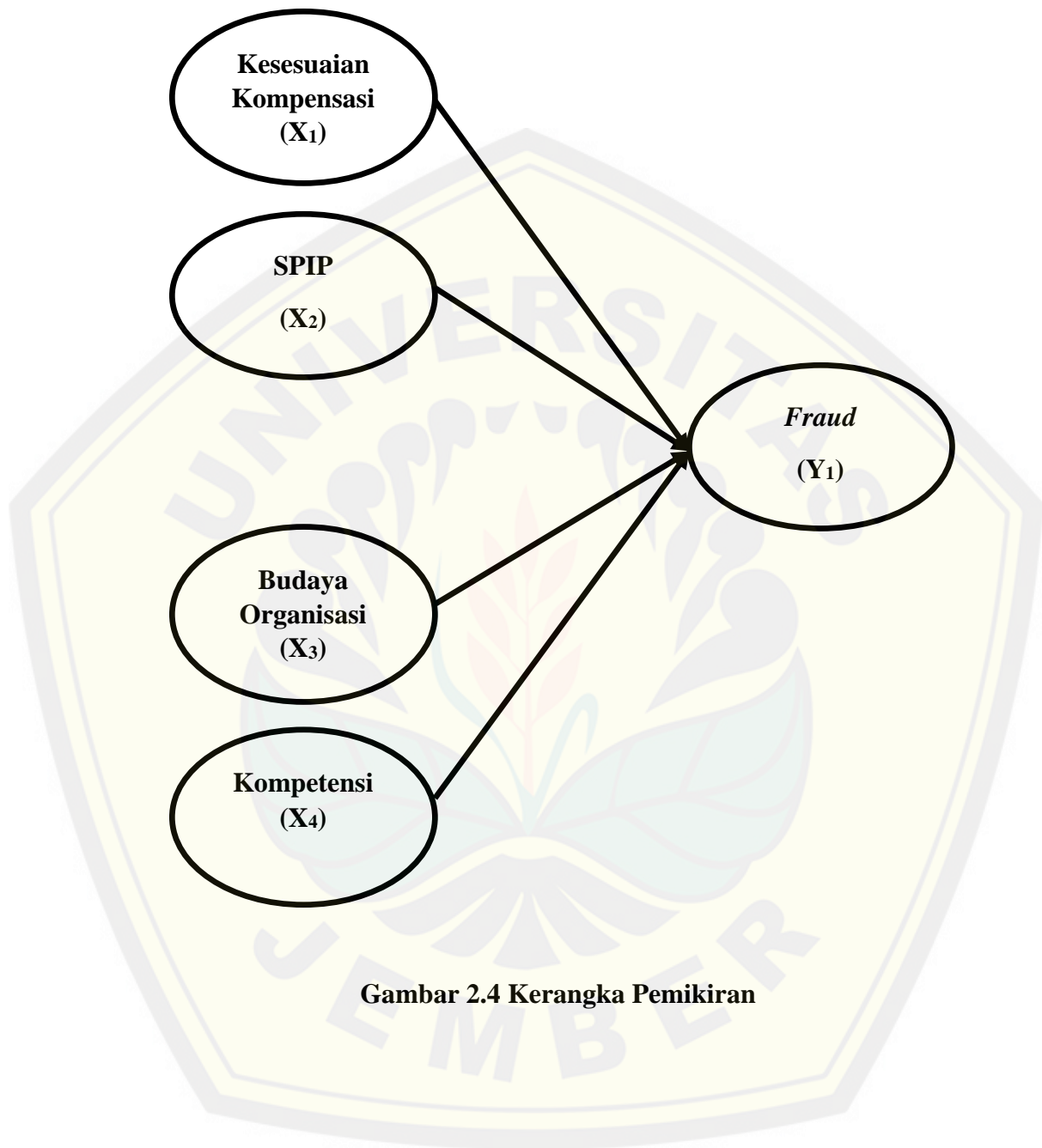
2.4.4 Pengaruh Kompetensi terhadap *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) menjelaskan bahwa kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi yang mempengaruhi kinerja. Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang yang berhubungan secara langsung yang memenuhi kriteria untuk dapat menjalankan tugas (Palan, 2007:6). Hal tersebut membuat kompetensi yang terdapat diri seseorang sangat penting untuk dikembangkan dengan baik.

Hasil penelitian Wijayanti Dan Hanafi (2018), dimana karakteristik personal berpengaruh positif signifikan pada kecenderungan *fraud* pada pemerintah desa. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Laksmi dan Sujana (2019) dan Putra dan Rahayu (2019), dimana kompetensi SDM sangat mempengaruhi dengan adanya tindakan kecurangan pada pemerintahan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kompetensi SDM yang dimiliki apabila tidak digunakan dengan semestinya maka dapat mempengaruhi adanya tindakan kecurangan pada sektor pemerintahan. Apabila kompetensi SDM yang dimiliki bisa digunakan dengan semestinya, maka dapat mencegah adanya tindakan kecurangan dan tentunya akan membantu organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

H4: Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Kuesioner disini dibagikan langsung kepada pegawai-pegawai pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Dalam kuesioner peneliti melakukan pengujian kepada pegawai-pegawai pemerintah desa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan dalam instansi pemerintah desa berdasarkan teori *Fraud Diamond*.

Penelitian ini menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, budaya organisasi, perilaku tidak etis, dan kompetensi sebagai variabel independen terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek yaitu pegawai-pegawai pemerintah desa yang tersebar di desa-desa yang berada di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh *Fraud Diamond* Bagi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Keuangan Desa”. Tempat yang diambil dalam penelitian yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Sidoarjo yang terdiri dari 10 desa dan 14 kelurahan diantaranya: Desa Banjarbendo, Desa Bluru Kidul, Desa Cemengbakalan, Desa Jati, Desa Kemiri, Desa Lebo, Rangka Kidul, Desa Sarirogo, Desa Suko, Desa Sumput, Kelurahan Bulusidokare, Kelurahan Celep, Kelurahan Cemengkalang, Kelurahan Gebang, Kelurahan Lemahputro, Kelurahan Magersari, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Pucang, Kelurahan Pucanganom, Kelurahan Sekardangan, Kelurahan Sidokare, Kelurahan Sidoklumpuk, Kelurahan Sidokumpul, dan Kelurahan Urangagung.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:136). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 populasi dalam penelitian ini merupakan aparatur desa yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa, yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi desa. Kecamatan Sidoarjo memiliki daerah pemerintahan desa sebanyak 10 desa dan 14 keluaran dengan jumlah pegawai desa sebanyak 192 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi perencanaan, dan kepala seksi tata usaha dan umum.

Melihat jumlah objek populasi yang banyak, maka dibutuhkan sampel penelitian guna untuk mengurangi adanya permasalahan dalam tenaga, waktu bahkan biaya dalam pengambilan data. Sampel merupakan bagian dari jumlah objek dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:18). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, dimana dalam teknik ini hanya mengambil pegawai-pegawai pemerintah desa yang memiliki standar pengalaman kerja minimal satu tahun dan yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa.

3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:2), data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden pada desa-desa dengan cara menyebar kuesioner pada pegawai-pegawai yang berada di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey dengan melalui mengumpulkan kuesioner yang telah disebar ke beberapa responden. Metode survei merupakan metode mengumpulkan data primer yang menggunakan tanggapan tertulis sebagai metode survei, apabila data pernyataan terstruktur yang ditanyakan kepada responden merupakan kuesioner (Indriantoro dan Soepomo, 2014:145). Kuesioner disebar kepada responden untuk diisi sesuai dengan pendapat dan persepsi responden. Dalam menentukan jawaban kuesioner penelitian ini menggunakan teknik skala likert dengan penilaian dari 1 hingga dengan 5 yang mengukur tanggapan seseorang terhadap kecurangan.

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Skala *Likert*

No.	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju(KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan berdasarkan *fraud diamond* yang diproksikan menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* yang terdapat pada instansi pemerintahan. Penelitian ini menganalisis pengaruh antara variabel independen yaitu *pressure*, *opportunity*, *razionalitation*, dan *capability* yang diproksikan menjadi kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, dan kompetensi dengan menggunakan variabel dependen kecurangan pengelolaan keuangan desa.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian kali ini yaitu kecurangan pengelolaan keuangan desa. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perilaku penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tetapi dengan cara merugikan orang lain. Variabel ini mempersepsikan tindakan kecurangan yang terjadi disektor publik, khususnya diinstansi pemerintahd desa. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi pula frekuensi kecurangan yang terjadi. Terdapat 3 item dalam pengukuran variabel ini, dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban responden. Indikator pengukuran tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Penyalahgunaan laporan keuangan
- 2) Penyalahgunaan aset
- 3) Korupsi

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen untuk menghasilkan pengaruh positif maupun negatif. Variabel independen merupakan variabel yang tidak dapat dipengaruhi keberadaannya oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *pressure*, *opportunity*, *razionalitation*, dan *capability* yang diprosikan menjadi kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, dan kompetensi.

3.5.2.1 Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh atasan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan ataupun organisasi (Ardana 2012:153). Kesesuaian kompensasi merupakan pemberian berupa materiil maupun non materiil kepada karyawan atas balas jasa yang telah dilakukannya. Pengukuran kesesuaian kompensasi yang dikembangkan Wilopo dalam Mustikasari (2013) terdapat 6 pertanyaan, dengan menggunakan skala

likert 1-5 untuk mengukur jawaban responden. Indikator pengukuran kesesuaian kompensasi tersebut diantaranya yaitu:

- a. Kompensasi keuangan;
- b. Pengukuran instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Promosi;
- d. Penyelesaian tugas;
- e. Pencapaian sasaran;
- f. Pengembangan pribadi.

3.5.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan pemahaman karyawan dalam suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdapat tiga golongan yang akan dituju, yaitu: efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan, keandalan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdapat 5 item dalam pengukuran variabel ini, dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban responden. Indikator pengukuran keefektifan Sistem Pengendalian Internal tersebut diantaranya yaitu:

- a. Patuh terhadap lingkungan pengendalian internal;
- b. Patuh terhadap manajemen risiko;
- c. Patuh terhadap pengendalian;
- d. Patuh terhadap informasi dan komunikasi;
- e. Patuh terhadap pemantauan pengendalian intern.

3.5.2.3 Budaya Organisasi

Perusahaan atau organisasi yang terdiri atas sejumlah orang dengan latar belakang, kepribadian, emosi dan ego yang beragam yang membentuk suatu interaksi dari berbagai orang disebut budaya organisasi. Atau bisa dikatakan budaya organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama. Menurut Robbins (2003:721) budaya organisasi

merupakan sistem bersama yang dianut oleh karyawan-karyawan yang membedakan dari organisasi lain. Pengukuran budaya organisasi yang oleh Robins dalam Mustikasari (2013) terdapat 5 pertanyaan, dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban responden. Indikator pengukuran kesesuaian kompensasi tersebut diantaranya yaitu:

- a. Model peran yang yang visibel;
- b. Komunikasi harapan;
- c. Pelatihan;
- d. Hukuman bagi yang melanggar budaya organisasi;
- e. Mekanisme perlindungan.

3.5.2.4 Kompetensi

Kompetensi merupakan sikap atau karakter seseorang untuk menjalankan pekerjaannya dengan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta dapat menarik kesimpulan dalam menentukan bagaimana seseorang tersebut harus bertahan untuk waktu periode tertentu. Menurut Indirani (2016) terdapat 7 item pengukuran kompetensi, dengan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban responden. Indikator pengukuran kompetensi tersebut diantaranya yaitu:

- a. Pemahaman terhadap prosedur kerja;
- b. Pemahaman terhadap rencana dan target kerja;
- c. Pemahaman proses kerja bagian lain;
- d. Pemahaman situasi dan permasalahan organisasi;
- e. Kemampuan penyesuaian diri dan bekerja sama;
- f. Kemampuan menyampaikan ide;
- g. Pemahaman peralatan dan teknologi informasi.

3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik sebagai alat analisis utamanya. Alat statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda yang dibantu dengan statistik SPSS. Peneliti menggunakan alat statistik karena ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

3.6.1 Statistika deskriptif

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara meringkas, pengelola, serta menganalisis data untuk disajikan sebagai suatu informasi yang berguna untuk melakukan pengambilan keputusan. Statistika deskriptif merupakan pengumpulan, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram ataupun gambar yang menggambarkan hal sesuatu, dari data tersebut disajikan dalam bentuk yang lebih mudah (Subagyo, 2003:1)

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji yang digunakan untuk syarat dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner guna data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas yakni ketepatan, kebermakanaan, serta kemanfaatan sari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes (Kusaeri dan Suprananto, 2012:81). Uji validitas merupakan pengujian yang sah apabila kuesioner mampu mengungkapkan faktor yang diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian menggunakan uji validitas yang menggabungkan antara total skor pada masing-masing indikator dengan total skor konstruk yang memiliki nilai *Pearson Correlation* $>0,5$ dan signifikan $<0,05$ (Ghozali, 2016:52). Uji validitas dihasilkan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} .

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner-kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Dimana kuesioner yang benar apabila bisa memberikan jawaban yang konsisten pada saat memberikan pertanyaan kembali kepada responden. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *ronbach Alpha* yang memiliki koefisien alpha (α) $> 0,6$ yang bisa dikatakan reliabel (Ghozali 2016:47).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah menentukan statistik deskripsi serta pengujian kualitas maka langkah selanjutnya menentukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidak selarasan sebab tidak semua data bisa menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Normalitas Data, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam metode regresi ini hasil *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Ghazali (2016:154), analisis grafik dan uji statistik yakni cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Metode regresi yang baik yakni metode yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1) histogram; 2) normal *probability plot*; serta 3) *kolmogorov smirnov*. Tetapi pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu cara saja, yaitu normal *probability plot*.

Pengujian normal *probability plot* digunakan untuk menunjukkan data terdistribusi normal apabila titik-titik mendekati garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal. Apabila terdistribusi tidak normal maka titik-titik akan menyebar dan tidak menjauh dari garis diagonal.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan yang kolerasi atau tidak antara variabel. Ghazali (2016:103) menyatakan bahwa model regresi yang baik semestinya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Dalam pengujian multikolinieritas terdapat cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan cara melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance. Menurut Duwi Priyatno (2009) bahwa model regresi yang dapat dikatakan memiliki masalah multikolinieritas apabila mencapai nilai $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,1$.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi penyimpangan model dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Grafik yang digunakan dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas adalah grafik Plot. Apabila titik-titiknya membentuk pola teratur, maka diindikasikan terdapat masalah pada uji heteroskedastisitas. Sedangkan apabila tidak terdapat masalah pada uji heteroskedastisitas, maka titik-titiknya menyebar keatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak ada pola yang jelas (Ghozali, 2016:134).

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat pada variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017:275), analisis regresi linier berganda adalah pengukur bagaimana keadaan pengaruh variabel dependen dengan variabel independen, dimana terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor penghubung. Terdapat persamaan rumus yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kecuranga (*Fraud*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Kesesuaian Kompensasi

X2 = Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X3 = Budaya Organisasi

X4 = Kompetensi

e = Kesalahan regresi (error)

3.6.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah semua pengujian-pengujian yang telah dilakukan dikatakan lulus atau selesai. Hasil dari pengujian hipotesis digunakan untuk dasar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam pengujian ini terdapat tiga pengujian yang akan dilakukan:

a. Uji F

Pengujian F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai F_{hitung} dan nilai F_{tabel} dengan melihat tingkat *sig level* 0,05. Apabila nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ maka variabel silmutan, atau sebaliknya. Sedangkan tingkat *sig level* $< 0,05$ variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau sebaliknya (Ghozali 2016:96).

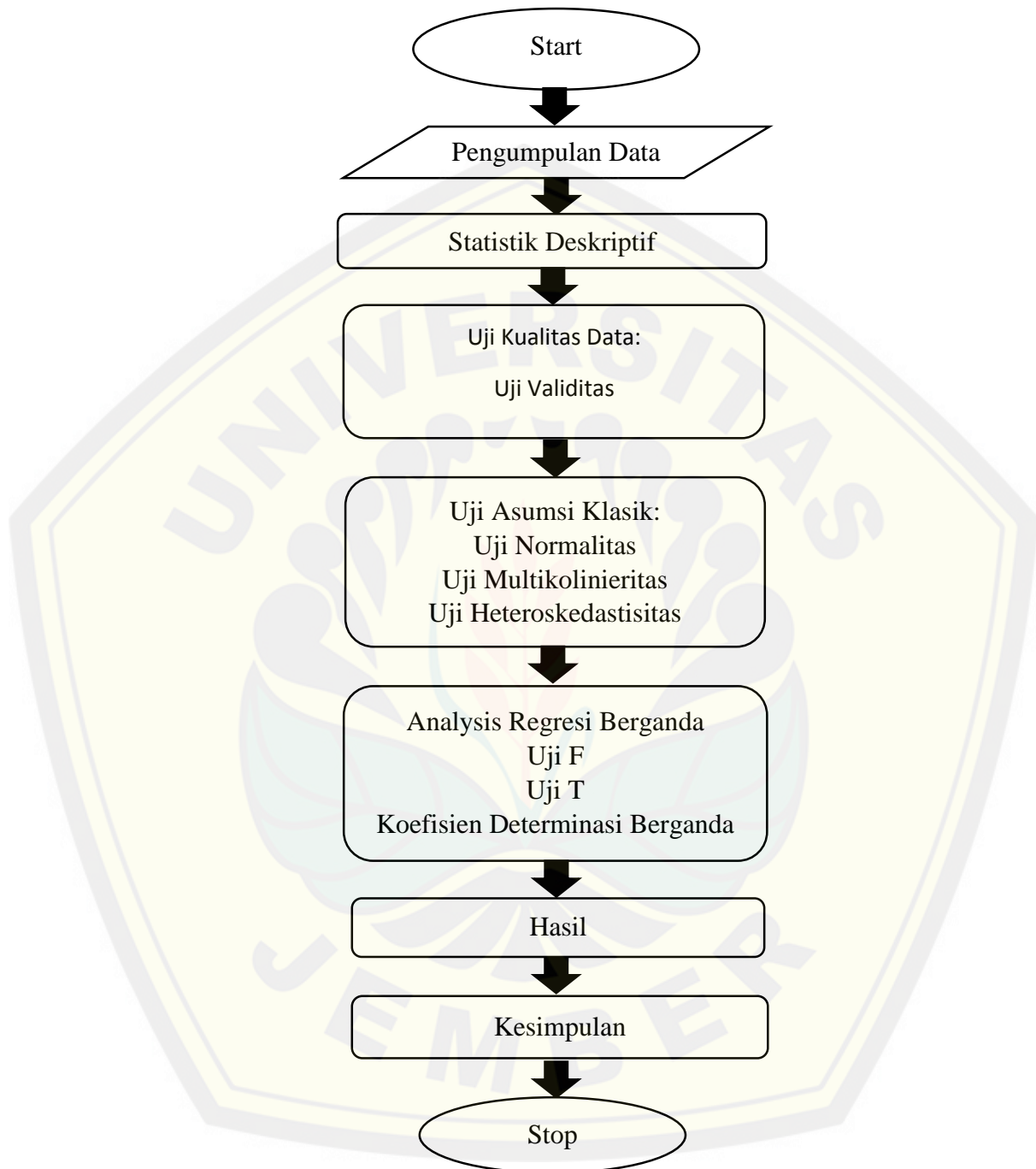
b. Uji t

Pengujian t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *sig level* 0,05. Apabila *sig level* $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen itu artinya *sig level* $> 0,05$ (Ghozali 2016:97).

c. Koefisien Determinasi Berganda

Pengujian koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengetahui berapa persentasi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai R^2 semakin tinggi dari model regresi maka hasilnya semakin baik. Untuk nilai R^2 yang mendekati 1 maka variabel independen hampir mendekati apa yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

**Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah**

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka kesimpulan yang didapatkan, sebagai berikut:

- a. Kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada kecamatan sidoarjo. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada pemerintah desa. Hal tersebut menjadi kesesuaian kompensasi yang diterima pegawai pemerintah desa mengurangi adanya tindakan kecurangan. Hasil ini didukung dengan h_1 menyatakan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan;
- b. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah Kecamatan Sidoarjo dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo sudah melakukan sistem pengawasan yang baik, sehingga dapat mengurangi adanya tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin saja terjadi. Hasil ini didukung dengan h_2 yang menyatakan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa;
- c. Budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo. Sistem budaya organisasi yang diterapkan pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo sudah berjalan dengan baik dan benar, sehingga dapat mengurangi bahkan dapat menghilangkan praktik-pratik kecurangan yang mungkin saja terjadi apabila tidak adanya budaya organisasi yang baik. Hasil ini didukung dengan h_3 yang menyatakan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan;
- d. Kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo. Apabila kompetensi

yang dimiliki pegawai pemerintah desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mudah itu merupakan hal baik, namun apabila pegawai pemerintah desa memiliki kompetensi dalam memahami kelemahan pengendalian intern maka pegawai pemerintah desa dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil ini diperkuat dengan h4 yang menyatakan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan agar dapat memberikan hasil yang baik lagi. Sarannya sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah desa pada Kecamatan Sidoarjo pertahankanlah pemberian kompensasi yang sudah sesuai serta perkuat kembali sistem pengendalian intern pemerintah dan budaya organisasinya, agar dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan pemerintah yang bersih akan tindakan-tindakan kecurangan. Namun untuk kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pemerintah desa perlu diperhatikan dan perlu adanya pengawasan agar pegawai pemerintah desa tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo. Tentunya agar dapat mencapai tujuan dari pemerintah desa yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya indikator pada setiap kelompok perlu diperhatikan kembali, agar pada saat melakukan penelitian tidak mengalami kebingungan karena menjumpai untuk hasil yang berbeda pada kelompok yang sama. Serta perhatikan kembali jumlah responden yang digunakan, karena semakin sedikit responden yang digunakan mungkin dapat menghasilkan hasil yang tidak memenuhi kriteria.

5.3 Keterbatasan

Responden yang digunakan sulit untuk ditemui sehingga menghambat dalam melakukan pengambilan data. Serta jumlah sampel yang sedikit sehingga membuat hasil yang dihasilkan tidak maksimal dan masih terdapat hasil dari responden yang asal mengisi saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks / Lembaga

- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agoes, Sukrisno. 2008. *Auditing Petuntuju Praktik Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ardana, Komang, dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bangsaonline.com. 2015-2018. Korupsi-Sidoarjo. <https://www.bangsaonline.com/tag/korupsi-sidoarjo>.
- Cressey, Donald R. 1953. *Other People's Money*. Paterson Smith. Montclair.
- Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS (Edisi 8)* Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Griffin, Ricky. 2004. *Manajemen*. Cetakan Keempat. Jakarta; Erlangga.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2013. *Dasar Akuntansi*. Jakarta: Media Kom.
- IAI. 2012. *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indriantoro, N., dan Bambang Soepomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2015-2018. *Jumlah Kasus Korupsi*. ICW, Jakarta. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>. (Diakses 29 September 2019)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. (Diakses 27 September 2019)
- Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2005. *Perilaku Organisasi*. Buku 1. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusaeri dan Suprananto, 2012 *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Luthans, Fred. (1998). *Organization Behavior*. International Edition, Sixth Edition, Mc Graw-Hill.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H. Hadari. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palan, R. 2007. *Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PPM.
- Panggabean, S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins, Stephen. P. 1996. *Perilaku Organisasi Edisi Ke 7 (Jillid II)*. Jakarta: Prehallindo
- _____. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Index.
- Sastrohadiwiryo, B.S. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soelaiman. 2007. *Manajemen Kinerja - Langkah Efektif Untuk Membangun Mengendalikan Dan Evaluasi Kerja*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama.

Sigit, Soehardi. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Terbitan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa

Subagyo, Pangestu. 2003. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: BP Fakultas Ekonomi Gadjah Mada University.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Suparno, Erman. 2012. *Kebijakan Dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja*

Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Umar, Husein. 2007. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA*. Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.

Wolfe, David T Dan Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud. *CPA Journal (Management Fraud)*: 38-42.

Peraturan, Undang-Undang Atau Sejenisnya

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanegaraan.

Artikel Pada Jurnal Ilmiah

Ade, A. 2017. Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas Dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar). *Artikel Universitas Negeri Padang*.

Kurniawan, G. 2014. Pengaruh Moralitas, Motivasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*. 1 (3).

Laksmi, P. S. dan I Ketut Sujana. 2019. Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. 26 (3).

Noviriantini, K, Nyoman A. S. D. dan Desak Nyoman S. W. 2015. Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 3 (1).

Mustikasari, D. Putri. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintah Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*.

Putra, M. A. P. dan Nugroho Tulus Rahayu. 2019. Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Prosiding*. Vol 2.

Sari, M. E, Fefri I. A. dan Salma Taqwa. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(3)

Wijayanti Provita dan Rustam Hanafi. 2018. Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiradigma*. 9(2).

Wirakusuma, I G. dan Putu Ery Setiawan. 2019. Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*. 26 (2).

Wulandari, R. dan Dhini S.. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.

Zulkarnain, R. M. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal* 2 (2).

Skripsi/Tesis

Afsari, Siti Fitriani. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecueangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori *Fraud Triangle*: Persepsi Pegawai Pemerintah (Studi Empiris Skpd Di Kabupaten Jember). *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Fitriana, A. 2010. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Pura Group (Perseroan) Di Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Indriani, I. A. S. dan S. Maghfiroh. 2016. Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. *Skripsi*. Universitas Jendral Soedirman.

Kurniawan, G. 2013, Pengaruh Moralitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Di Kota Solok). *Skripsi*, Padang: Universitas Negri Padang.

LAMPIRAN

KUESIONER

Nama :

Jabatan :

Masa Kerja :

Alamat Desa :

Daftar Pertanyaan Kuesioner

Kesesuaian Kompensasi							
No	Indikator	Pertanyaan	STS	TS	KT	S	SS
1	Kompensasi keuangan	Gaji yang diberikan oleh pemerintah desa sesuai dengan pekerjaan yang telah anda kerjakan					
2	Pengukuran instansi atas keberhasilan	Pada pemerintah desa ini memberikan bonus yang sesuai dengan keberhasilan atas pencapaian kerja anda					
3	Promosi	Bonus di pemerintah desa diberikan karena keberhasilan kinerja yang dicapai para pegawai					
4	Penyelesaian tugas	Manajemen pemerintah desa ini mengelola secara bijak sehingga pegawai dalam pemerintah desa dapat melakukan dan menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik					
5	Pencapaian sasaran	Pekerjaan anda pada pemerintah desa ini merupakan tanggung jawab yang besar yang harus diselesai sesuai dengan target					
6	Pengembangan pribadi	Pada pemerintah desa ini, anda melakukan pekerjaan dengan kemampuan, pengetahuan dan keahlian.					

Pengendalian Intern							
No	Indikator	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
7	Patuh terhadap lingkungan	Pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada pemerintah desa ini sudah jelas					
8	pengendalian internal	Pada pemerintah desa ini sudah mempunyai komite audit					
9	Patuh terhadap manajemen risiko	Pada pemerintah desa ini sudah memiliki penilaian untuk menilai risiko yang dibuat secara formal					
10	Patuh terhadap pengendalian	Pada pemerintah desa ini sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan sistem keuangan desa					
11	Patuh terhadap informasi	Pada pemerintah desa ini menggunakan sistem informasi yang bekerja dengan baik					
12	dan komunikasi	Pada pemerintah desa ini semua informasi yang berhubungan dengan operasional dicatat pada sistem akuntansi					
13	Patuh terhadap pemantauan pengendalian intern	Pada pemerintah desa ini memiliki standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas operasional yang digunakan untuk pengendalian intern					

Budaya Organisasi							
No	Indikator	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
14	Model peran yang yang	Pada pemerintah desa ini sikap dan sifat atasan dijadikan panutan oleh para					

	visibel	pegawai					
15	Komunikasi harapan	Pada pemerintah desa ini menerapkan kode etik yang sesuai dengan nilai organisasi yang harus dijalankan oleh pegawai					
16	Pelatihan	Pada pemerintah desa ini sering melakukan penyuluhan dan praktik tentang standar nilai organisasi					
17	Hukuman bagi pelanggar	Pada pemerintah desa ini memberikan sanksi kepada pegawai yang berbuat yang tidak etis					
18	Mekanisme perlindungan	Pada pemerintah desa ini melemahnya perlindungan etika					

Kompetensi							
No	Indikator	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
19	Paham prosedur kerja	Anda memahami apa tanggungjawab anda dalam mencapai tujuan dari pemerintah desa					
20	Paham rencana dan target kerja	Pada pemerintah desa ini anda memahami tujuan dan harapan pemerintah desa					
21	Paham proses kerja bagian lain	Pada pemerintah desa ini anda mengetahui proses kerja bagian lain					
22	Paham situasi dan permasalahan organisasi	Pada pemerintah desa ini anda diwajibkan memahami permasalahan					
23	Mampu penyesuaian dan bekerja	Pada pemerintah desa ini anda terbiasa dengan bekerja sama secara tim atau kelompok					

	sama						
24	Mampu menyampaikan ide	Pada pemerintah desa ini anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat					
25	Paham teknologi informasi	Pada pemerintah desa ini anda diwajibkan untuk memahami tentang teknologi informasi					

Kecurangan							
No	Indikator	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
26	Penyalahgunaan laporan keuangan	Merupakan sesuatu yang wajar di pemerintah desa apabila pengguna keuangan desa memasukan kebutuhan yang tidak seharusnya					
27	Penyalahgunaan aset	Suatu hal yang wajar apabila pada pemerintah desa ini pengguna keuangan desa menggunakan kwitansi kosong					
28		Bukan masalah bagi pemerintah apabila sisa keuangan desa diambil pimpinan					
29	Korupsi	Pada pemerintah desa ini kelompok belanja sesuai dengan kebutuhan desa					
30		Pada pemerintah desa ini dilarang melakukan pungutan kepada warga sebagai penerimaan					

Hasil Kuesioner

Responden	Indikator Variabel												
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13
1	3	2	2	2	4	3	4	2	2	3	3	3	2
2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3
5	4	4	4	3	5	5	3	4	4	3	5	3	4

6	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	4	5
7	4	3	3	2	3	4	3	2	3	4	5	4	3
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
9	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	5	5
10	4	4	3	3	3	2	2	3	4	4	4	4	4
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
12	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5
13	4	3	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3	4
14	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4
15	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
16	4	5	4	3	4	5	4	4	5	5	5	5	5
17	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4
18	4	4	3	3	4	4	3	4	2	3	2	4	3
19	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
20	2	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	3	3
21	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5
22	3	2	2	3	4	4	3	4	4	3	2	2	4
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
24	5	5	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
27	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5
28	4	2	2	4	4	4	4	4	2	3	3	2	3
29	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
30	3	3	3	4	4	4	3	5	2	2	2	2	3
31	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
32	5	3	3	3	4	4	3	4	3	4	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
34	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5
36	3	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4
37	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
38	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2
39	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3
40	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
41	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
43	3	5	5	4	3	4	4	5	3	4	5	4	5

44	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3	4	2
45	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
46	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	3	4
47	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
48	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4
49	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	3	4	4
50	5	5	5	5	5	5	3	2	2	3	2	3	2
51	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
52	5	5	5	5	5	5	4	2	3	3	4	3	3
53	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3
54	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	3
55	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	2	3
56	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5
57	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5
59	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
61	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
63	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
64	5	5	5	5	5	5	5	2	3	3	3	2	4
65	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	3	3	3
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
67	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	3	3	3
68	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5

Responden	Indikator Variabel											
	X3.14	X3.15	X3.16	X3.17	X3.18	X4.19	X4.20	X4.21	X4.22	X4.23	X4.24	X4.25
1	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	4	2
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	5	5	5	5	5	3	2	3	3	4	4	4
4	2	2	3	4	3	3	3	2	4	4	3	2
5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
6	5	5	5	3	3	3	1	2	2	3	3	3
7	4	4	3	2	3	5	4	5	5	4	5	5
8	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3

9	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	1
10	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	3	4
11	5	5	5	5	5	3	2	3	2	2	5	5
12	5	5	5	5	5	2	2	2	3	3	3	3
13	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	5
15	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	2	3
16	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4
17	4	4	4	5	3	3	1	2	2	3	3	2
18	2	3	4	2	4	3	3	2	4	4	3	2
19	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
20	2	4	4	4	2	2	3	3	2	2	4	4
21	5	5	5	5	5	4	3	2	2	3	4	2
22	3	5	5	4	4	3	2	3	3	3	3	3
23	3	3	2	3	3	2	2	2	2	1	1	2
24	5	5	5	5	5	2	2	1	3	3	2	1
25	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	5	5
26	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	3	5
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
28	4	3	2	3	3	3	4	4	4	4	2	2
29	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
30	2	3	2	3	2	4	3	3	3	3	3	4
31	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5
32	4	5	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
33	5	5	5	5	5	3	3	4	3	3	4	4
34	5	5	5	5	5	2	3	3	4	4	4	4
35	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3
36	3	3	4	4	2	4	3	3	2	3	4	4
37	4	3	3	3	3	5	3	4	3	2	3	5
38	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2
39	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2	2
40	4	4	3	3	2	2	4	3	2	3	3	3
41	2	2	2	2	2	4	3	3	4	2	2	4
42	5	5	5	5	5	3	2	2	3	4	2	4
43	5	5	5	2	3	3	4	4	4	4	2	2
44	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
45	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3	5	5
46	3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3

47	4	4	4	5	3	3	3	5	3	3	3	3
48	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4
49	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	3	4
50	2	2	2	2	2	5	5	3	4	5	4	4
51	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4
52	5	5	5	5	5	3	4	2	3	4	2	3
53	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4
54	5	5	5	5	5	3	3	4	3	3	3	3
55	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4
56	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4
57	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
58	5	5	5	5	5	5	3	5	3	4	4	4
59	5	5	5	5	5	2	3	3	3	3	3	3
60	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4
61	5	5	5	5	5	3	4	2	3	4	3	3
62	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
63	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	3	4
64	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4
65	5	5	5	5	5	3	3	4	2	2	3	3
66	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	5
67	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	2
68	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4
69	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4

Responden	Indikator Variabel				
	Y1.26	Y1.27	Y1.28	Y1.29	Y1.30
1	2	2	2	4	4
2	1	2	1	4	4
3	1	1	1	3	4
4	2	1	1	4	4
5	2	2	2	5	5
6	2	1	1	3	3
7	2	2	2	4	4
8	1	1	1	3	4
9	1	1	1	3	4
10	1	1	1	3	4
11	1	1	1	4	3

12	1	1	1	3	4
13	1	2	1	4	5
14	1	1	1	3	4
15	1	1	1	3	4
16	1	1	1	4	3
17	1	1	1	3	4
18	2	2	2	4	5
19	1	1	2	4	3
20	2	2	2	4	4
21	1	1	1	3	4
22	4	1	3	2	2
23	1	1	1	4	3
24	1	1	1	3	4
25	1	1	1	4	3
26	1	1	1	3	4
27	1	1	1	4	3
28	2	2	2	4	4
29	1	2	2	5	5
30	4	2	2	4	4
31	1	1	1	4	3
32	1	1	1	4	4
33	1	1	1	4	3
34	1	1	1	3	4
35	1	1	1	4	3
36	1	1	2	5	5
37	1	1	1	3	4
38	1	1	1	4	3
39	2	1	2	5	5
40	1	1	1	3	4
41	3	2	2	4	4
42	1	1	1	3	4
43	1	2	2	4	4
44	1	1	1	5	4
45	1	1	1	4	3
46	1	1	1	5	5
47	1	1	1	3	4
48	1	1	1	5	3
49	1	1	1	4	3

50	2	3	2	3	4
51	1	1	1	4	3
52	1	1	1	3	4
53	1	1	1	3	4
54	1	1	1	4	3
55	1	1	1	4	3
56	1	1	1	3	4
57	1	1	1	4	3
58	1	1	1	3	4
59	1	1	1	4	3
60	1	1	1	3	4
61	1	1	1	4	3
62	1	1	1	3	4
63	1	1	1	3	4
64	1	1	1	4	3
65	1	1	1	4	3
66	1	1	1	3	4
67	1	1	1	3	4
68	1	1	1	4	3
69	1	1	1	4	3

Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	69	16	30	27,39	4,209
X2	69	17	33	28,26	5,204
X3	69	10	25	21,04	4,888
X4	69	12	33	23,86	4,041
Y1	69	10	16	11,10	1,840
Valid N (listwise)	69				

Frekuensi Karakteristik

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,5 - 5 Tahun	48	69,6	69,6	69,6
	2	21	30,4	30,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Desa	24	34,8	34,8	34,8
	Bendahara	24	34,8	34,8	69,6
	Kepala Perencanaan	21	30,4	30,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Frekuensi Responden

		X1.1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,4	1,4	1,4
	3	9	13,0	13,0	14,5
	4	9	13,0	13,0	27,5
	5	50	72,5	72,5	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

		X1.2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4,3	4,3	4,3
	3	7	10,1	10,1	14,5
	4	7	10,1	10,1	24,6
	5	52	75,4	75,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

		X1.3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4,3	4,3	4,3
	3	11	15,9	15,9	20,3
	4	6	8,7	8,7	29,0
	5	49	71,0	71,0	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

		X1.4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	3	11	15,9	15,9	18,8
	4	8	11,6	11,6	30,4
	5	48	69,6	69,6	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	6	8,7	8,7	8,7
	4	13	18,8	18,8	27,5
	5	50	72,5	72,5	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,4	1,4	1,4
	3	3	4,3	4,3	5,8
	4	13	18,8	18,8	24,6
	5	52	75,4	75,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	3	14	20,3	20,3	23,2
	4	27	39,1	39,1	62,3
	5	26	37,7	37,7	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	8,7	8,7	8,7
	3	11	15,9	15,9	24,6
	4	19	27,5	27,5	52,2
	5	33	47,8	47,8	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	11,6	11,6	11,6
	3	21	30,4	30,4	42,0
	4	15	21,7	21,7	63,8
	5	25	36,2	36,2	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	3	18	26,1	26,1	29,0
	4	23	33,3	33,3	62,3

	5	26	37,7	37,7	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	7,2	7,2	7,2
	3	17	24,6	24,6	31,9
	4	13	18,8	18,8	50,7
	5	34	49,3	49,3	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	7,2	7,2	7,2
	3	16	23,2	23,2	30,4
	4	26	37,7	37,7	68,1
	5	16	23,2	31,9	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X2.13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	5,8	5,8	5,8
	3	16	23,2	23,2	29,0
	4	20	29,0	29,0	58,0
	5	29	42,0	42,0	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X3.14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	13,0	13,0	13,0
	3	5	7,2	7,2	20,3
	4	15	21,7	21,7	42,0
	5	40	58,0	58,0	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X3.15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	8,7	8,7	8,7
	3	9	13,0	13,0	21,7
	4	11	15,9	15,9	37,7
	5	43	62,3	62,3	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X3.16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	11,6	11,6	11,6
	3	9	13,0	13,0	24,6
	4	11	15,9	15,9	40,6
	5	41	59,4	59,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X3.17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	10,1	10,1	10,1
	3	11	15,9	15,9	26,1
	4	13	18,8	18,8	44,9
	5	38	55,1	55,1	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X3.18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	11,6	11,6	11,6
	3	16	23,2	23,2	34,8
	4	9	13,0	13,0	47,8
	5	36	52,2	52,2	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X4.19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	10,1	10,1	10,1
	3	29	42,0	42,0	52,2
	4	25	36,2	36,2	88,4
	5	8	11,6	11,6	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X4.20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2,9	2,9	2,9
	2	7	10,1	10,1	13,0
	3	29	42,0	42,0	55,1
	4	25	36,2	36,2	91,3
	5	6	8,7	8,7	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X4.21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,4	1,4	1,4
	2	11	15,9	15,9	17,4
	3	27	39,1	39,1	56,5
	4	23	33,3	33,3	89,9
	5	7	10,1	10,1	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X4.22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	13,0	13,0	13,0
	3	32	46,4	46,4	59,4
	4	25	36,2	36,2	95,7
	5	3	4,3	4,3	100,0
		Total	69	100,0	100,0

X4.23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,4	1,4	1,4
	2	7	10,1	10,1	11,6
	3	28	40,6	40,6	52,2
	4	28	40,6	40,6	92,8
	5	5	7,2	7,2	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X4.24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,4	1,4	1,4
	2	10	14,5	14,5	15,9
	3	25	36,2	36,2	52,2
	4	27	39,1	39,1	91,3
	5	6	8,7	8,7	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

X4.25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2,9	2,9	2,9
	2	11	15,9	15,9	18,8
	3	16	23,2	23,2	42,0
	4	30	43,5	43,5	85,5
	5	10	14,5	14,5	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Y1.26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	56	81,2	81,2	81,2
	2	10	14,5	14,5	95,7
	3	1	1,4	1,4	97,1
	4	2	2,9	2,9	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Y1.27

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	56	81,2	81,2	81,2
	2	12	17,4	17,4	98,6
	3	1	1,4	1,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Y1.28

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	54	78,3	78,3	78,3
	2	14	20,3	20,3	98,6
	3	1	1,4	1,4	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Y1.29

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,4	1,4	1,4
	3	27	39,1	39,1	40,6
	4	34	49,3	49,3	89,9
	5	7	10,1	10,1	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Y1.30

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,4	1,4	1,4
	3	24	34,8	34,8	36,2
	4	37	53,6	53,6	89,9
	5	7	10,1	10,1	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Uji Validitas

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TS
X1.1	Pearson Correlation	1	,736**	,742**	,728**	,772**	,705**	,868**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
X1.2	Pearson Correlation	,736**	1	,887**	,766**	,707**	,727**	,905**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
X1.3	Pearson Correlation	,742**	,887**	1	,863**	,766**	,744**	,939**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
X1.4	Pearson Correlation	,728**	,766**	,863**	1	,792**	,767**	,918**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
X1.5	Pearson Correlation	,772**	,707**	,766**	,792**	1	,766**	,882**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
X1.6	Pearson Correlation	,705**	,727**	,744**	,767**	,766**	1	,863**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69
Total	Pearson Correlation	,868**	,905**	,939**	,918**	,882**	,863**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69

		X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	TS
X2.7	Pearson Correlation	1	,551	,425	,436**	,403**	,354**	,420**	,642
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,003	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X2.8	Pearson Correlation	,551	1	,573	,518**	,482**	,525**	,618**	,781
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X2.9	Pearson Correlation	,425	,573	1	,761**	,660**	,518**	,543**	,827
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X2.10	Pearson Correlation	,436	,518	,761	1	,690**	,608**	,548**	,832
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X2.11	Pearson Correlation	,403	,482	,660	,690**	1	,587**	,636**	,820
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X2.12	Pearson Correlation	,354	,525	,518	,608**	,587**	1	,613**	,767
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,000		,000	,000

X4.23	Pearson Correlation	,228	,279*	,114	,556**	1	,310**	,265*	,580
	Sig. (2-tailed)	,060	,020	,352	,000		,010	,028	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X4.24	Pearson Correlation	,191	,089	,243*	,139	,310**	1	,663**	,593
	Sig. (2-tailed)	,116	,468	,044	,256	,010		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
X4.25	Pearson Correlation	,306*	,142	,419**	,244*	,265*	,663**	1	,690
	Sig. (2-tailed)	,011	,245	,000	,044	,028	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69
Total	Pearson Correlation	,681**	,659**	,709**	,679**	,580**	,593**	,690**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69	69

		Y1.26	Y1.27	Y1.28	Y1.29	Y1.30	TS
Y1.26	Pearson Correlation	1	,493**	,751**	-,009	,034	,658**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,942	,784	,000
	N	69	69	69	69	69	69
Y1.27	Pearson Correlation	,493**	1	,638**	,221	,397**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,068	,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69
Y1.28	Pearson Correlation	,751**	,638**	1	,195	,214	,808**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,109	,078	,000
	N	69	69	69	69	69	69
Y1.29	Pearson Correlation	-,009	,221	,195	1	,097	,500**
	Sig. (2-tailed)	,942	,068	,109		,428	,000
	N	69	69	69	69	69	69
Y1.30	Pearson Correlation	,034	,397**	,214	,097	1	,555**
	Sig. (2-tailed)	,784	,001	,078	,428		,000
	N	69	69	69	69	69	69
Total	Pearson Correlation	,658**	,792**	,808**	,500**	,555**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69

Uji Reliabilitas

X1 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,948	6

X2 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,894	7

X3 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,906	5

X4 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,777	7

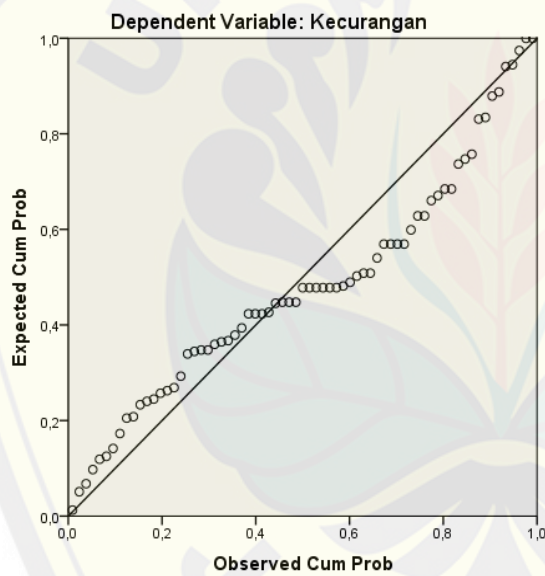
Y1 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,623	5

Uji Normalitas

Probability Plot (P-P)

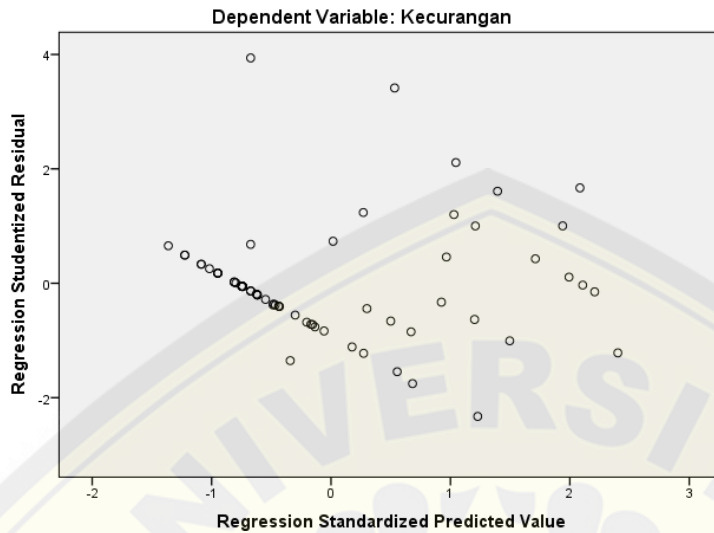
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Multikolinier

	Unstandardized		Standardized		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	17,983	1,358			13,245	,000		
Kesesuaian Kompensasi	-,120	,045	-,274		-2,686	,009	,636	1,573
SPIP	-,085	,034	-,241		-2,478	,016	,700	1,429
Budaya Organisasi	-,161	,036	-,428		-4,500	,000	,734	1,363
Kompetensi	,092	,038	,203		2,437	,018	,958	1,044

Uji Heteroskedastisitas



Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coef		Standardized Coef	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,983	1,358		13,245	,000
Kesesuaian Kompensasi (X1)	-,120	,045	-,274	-2,686	,009
SPIP (X2)	-,085	,034	-,241	-2,478	,016
Budaya Organisasi (X3)	-,161	,036	-,428	-4,500	,000
Kompetensi (X4)	,092	,038	,203	2,437	,018

Uji Hipotesis

a. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132,620	4	33,155	21,725	,000 ^b
	Residual	97,670	64	1,526		
	Total	230,290	68			

a. Dependent Variable: Kecurangan

b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Organisasi, SPIP

b. Koefesien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,576	,549	1,235

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Organisasi, SPIP